



PROGRAM INOVASI DESA



Bursa Inovasi Desa

Kabupaten Magelang

2017

DOKUMEN PEMBELAJARAN

DATANG. KOMIT. TIRU. MAJU

Bursa A

**Bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia**

DATANG. KOMIT. TIRU. MAJU

MEMBUKA JEJARING TAMBAHAN PENGAJAR DI PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Indah menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk menjaring sumberdaya manusia dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar. Hasilnya, kini PKBM yang telah beroperasi sejak 2006 ini didukung oleh staf pengajar atau tutor dengan beragam bidang dari sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi. Tak heran bila PKBM tersebut banyak mencetak lulusan yang siap kerja, diminati sektor usaha dan mandiri (memiliki usaha sendiri).

Latar Belakang

- PKBM Harapan Indah merupakan lembaga pendidikan nonformal dan nonprofit yang mulai beroperasi sejak 2006. Siswa tidak dikenakan biaya untuk mengikuti kelas-kelas keterampilan
- Terdapat empat pendidikan nonformal yang diselenggarakan di PKBM ini, yakni:
 - o Kelompok belajar usaha
 - o Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - o Pendidikan keaksaraan, dan
 - o Program kejar Paket A/B/C
- Minat warga untuk belajar di PKBM semakin meningkat, terutama di kelompok belajar usaha yang menyediakan berbagai pendidikan keterampilan
- Seiring bertambahnya siswa, ragam keterampilan yang diminati siswa pun semakin banyak
- Sumberdaya manusia untuk mendukung pendidikan keterampilan di PKBM belum memadai
- Anggaran pengadaan tenaga pengajar di PKBM masih terbatas

Solusi

Membuka jejaring untuk menghadirkan tambahan pengajar di PKBM

Manfaat

- PKBM mendapatkan tambahan pengajar untuk bidang keterampilan tertentu
- Bidang keterampilan yang ditawarkan PKBM menjadi lebih beragam
- Siswa PKBM memiliki pilihan pendidikan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka
- Menekan angka pengangguran di desa dan meningkatkan produktivitas masyarakat

Proses

- PKBM Harapan Indah semakin banyak diminati oleh warga untuk mendapat keterampilan dan menggali bakat mereka. Bukan hanya jumlah peminat yang bertambah, melainkan juga jenis keterampilan yang diminatinya bertambah
- Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengelola PKBM bermusyawarah internal hingga mencapai kesepakatan:
 - o Mencari tenaga pengajar (tutor) tambahan sesuai bidang-bidang keterampilan baru yang diminati siswa
 - o Jumlah tutor untuk setiap bidang
 - o Besaran honor yang akan diberikan
- Pengelola PKBM juga menginformasikan kebutuhan tersebut kepada warga dalam forum musyawarah

- Pengelola PKBM mencari informasi dan mengimpun data calon tutor, baik pendekatan persola, mencari informasi ke masyarakat hingga pihak lain, termasuk penilik pendidikan luar sekolah (PLS) dan perguruan tinggi
- Pengelola PKBM menghubungi calon tutor satu-per satu melalui telepon untuk meminta kesediaan mereka mengajar. Bagi yang bersedia dimasukkan dalam daftar pendek (shortlist)
- PKBM kemudian memanggil satu per satu calon tutor dalam shortlist untuk lebih memastikan ketertarikan mereka sekaligus mengenalkan lingkungan tempat bekerja mereka nantinya, serta menjelaskan beberapa hal penting, seperti
 - o PKBM ini adalah non-profit, tidak menarik iuran/biaya pada siswa
 - o Pengelola PKBM hanya mencari tenaga lepas
 - o Besar honor tidak besar dan pihak pengelola meminta kesukarelaan para tutor: Rp500 ribu per bulan untuk tutor biasa dan Rp 1 juta bagi tutor bersertifikat
- Tahap selanjutnya adalah membuat surat perjanjian atau kerjasama antara PKBM dengan calon tutor yang berminat
- Pengelola PKBM senior memberikan orientasi kepada tutor baru, baik terkait perkembangan PKBM, siswa, workshop yang dikelola PKBM, termasuk pola umum kegiatan PKBM:
 - a) Mengumpulkan dan mengajak warga untuk mengikuti pelatihan keterampilan
 - b) Mendiskusikan jenis pembelajaran yang dibutuhkan warga
 - c) Membentuk kelompok belajar sesuai jenis keterampilan
 - d) Mencari tutor berdasarkan jenis keterampilan
 - e) Mengajukan proposal pembiayaan kepada Direktorat Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) dan sponsor
 - f) Melaksanakan program pembelajaran dan kursus keterampilan
 - g) Melakukan evaluasi hasil pembelajaran
 - h) Monitoring lulusan
 - i) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada sponsor.

Pendanaan

- Dana operasional PKBM dari PNFI dan sponsor

Pelaku

- Pengelola PKBM
- Tenaga pengajar atau tutor

Hasil

- Pendidikan keterampilan yang ditawarkan PKBM semakin beragam, dari hanya tata rias dan merangkai bunga, bertambah menjadi tata boga, membuat kue, membuat kasur, menjahit, obras, pembuatan meubel, dan perbengkelan becak motor
- Terbentuk beragam usaha di desa seperti jasa penjahit, bengkel las bentor, katering, kue, sentra pembuatan meubel dan kasur
- Terdapat 11 kelompok usaha yang telah didirikan oleh alumni PKBM
- Banyak warga yang bekerja di perusahaan dan membuka usaha sendiri sehingga angka pengangguran relatif menurun

Pembelajaran

- Menyediakan tutor sesuai kebutuhan siswa dapat menarik minat belajar masyarakat dan menjaga kelangsungan PKBM
- Dengan kerjasama yang baik, tambahan tenaga pengajar dengan honor terjangkau bisa didapatkan dari perguruan tinggi, SMK, bahkan alumni PKBM sendiri
- PKBM dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa agar lebih kreatif, produktif dan menghasilkan barang bernilai ekonomi

Rekomendasi

- Pemerintah Desa dapat turut terlibat atau berkolaborasi dalam mengelola dan mengembangkan PKBM
- Akan lebih baik apabila PKBM dapat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah formal, baik untuk menjamin ketersediaan tenaga pengajar maupun kualitas materi pendidikan (kurikulum) yang diberikan

Kontak Informasi

Hariyanto Amrain, Kepala Desa Lauwону

HP : 085340916645

Rasuna Kasim, Pengelola PKBM

HP : 085240988615

PENANGANAN MASALAH LUAR BIASA BIDANG KESEHATAN MELALUI POSYANDU

Pemerintah Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menyediakan fasilitas Posyandu jiwa "Damar Wulan" guna memfasilitasi penanganan masalah luar biasa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hasilnya, kasus pemasangan ODGJ nihil, keseharian ODGJ menjadi lebih terkontrol dan keluarga ODGJ pun lebih percaya diri dalam bersosialisasi.

Latar Belakang

- Pada 2011, jumlah ODGJ yang terdata di desa Srigonco mencapai 24 orang, empat diantaranya dipasung
- Kondisi ODGJ dalam pasungan sangat memprihatinkan tanpa busana dan makan kotorannya sendiri
- Kebiasaan pasung bagi ODGJ dilakukan karena kurangnya pengetahuan keluarga, menyembunyikan rasa malu, dan konon demi keselamatan ODGJ itu sendiri
- Sebagian ODGJ berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak memiliki biaya untuk cara penanganan lain
- ODGJ yang berkeliaran di sekitar desa mengganggu kenyamanan warga dan pengunjung desa

Solusi

Penyediaan fasilitas Posyandu khusus oleh Pemerintah Desa untuk penanganan masalah luar biasa di bidang kesehatan, dalam hal ini ODGJ

Manfaat

- ODGJ mendapat pembinaan dan menurunkan kasus pemasangan
- Menurunkan risiko bahaya bagi warga sekitar dan ODGJ sendiri
- Menambah kenyamanan warga dan pengunjung desa

Proses

- Pada 2011 warga desa yang juga Petugas Kesehatan dari Puskesmas Bantur menemukan kasus ODGJ dalam pasungan, setidaknya ada 4 kasus pasung dari 24 ODGJ di desa tersebut
- Warga kemudian mencari informasi keberadaan keluarga ODGJ dan berusaha melakukan pendekatan
- Warga juga menghubungi RS Jiwa Lawang untuk mencari informasi tentang penanganan ODGJ
- Warga melakukan pendekatan kepada Posyandu reguler dan Puskesmas, guna mendapatkan dukungan penanganan ODGJ
- Petugas Kesehatan Puskesmas memberikan pengarahannya terkait rencana penanganan ODGJ kepada kader Posyandu reguler
- Petugas Puskesmas memberikan pembekalan terkait penanganan ODGJ kepada kader Posyandu reguler yang bersedia membantu
- Posyandu jiwa menghubungi jejaring yang diperoleh dari Puskesmas, termasuk menyampaikan usulan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan Posyandu jiwa secara reguler setiap bulan, menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Perguruan Tinggi
- Pemerintah Desa menyetujui usulan tersebut dan memberikan dukungan berupa:

- o Menyediakan fasilitas berupa tempat, bangku, meja, sound system untuk pelaksanaan Posyandu sehat jiwa
- o Instruksi bagi aparat untuk membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu jiwa
- o Instruksi kepada aparat dan perangkat desa untuk turut menjemput ODGJ dari rumah masing-masing pada hari-H Posyandu jiwa
- o Pengalokasian dana desa untuk kegiatan Posyandu jiwa sebagai bagian dari Pelayanan Sosial Dasar bidang kesehatan bagi warga
- Posyandu jiwa dilakukan secara reguler setiap bulan dengan pelayanan/kegiatan:
 - o Pemeriksaan kesehatan rutin
 - o Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) berupa pembiasaan salam, sapa, senyum
 - o Keterampilan merawat diri, seperti kebiasaan mandi, buang air, dan berpakaian
 - o Kunjungan kader ke rumah ODGJ yang tidak hadir pada hari H Posyandu jiwa untuk turut merawat dan melakukan pembinaan kepada keluarga
 - o Pemberian bahan makanan, alat-alat mandi, dll, sebagai pengganti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari sumbangan yang digalang kader
 - o Pelatihan keterampilan untuk belajar bekerja secara langsung di rumah penduduk

Pendanaan

- Swadaya masyarakat
- Dana Desa
- Donor

Pelaku

- Warga Desa
- Pemerintah Desa
- Puskesmas-Dinas Kesehatan
- Perguruan Tinggi

Hasil

- Kasus pemasangan ODGJ di desa Srigonco saat ini adalah nihil
- ODGJ dapat bersosialisasi dan terbiasa memberikan salam, sapa, senyum
- ODGJ dapat merawat diri sesuai kemampuan masing-masing
- ODGJ dapat membuat batik jumput, anyaman bambu dan kerajinan manik-manik
- Terbangunnya jaringan diantara Posyandu Jiwa, Pemerintahan Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi
- Kemudahan akses obat untuk ODGJ dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pembelajaran

- Layanan Posyandu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah kesehatan yang banyak terjadi di daerah masing-masing
- Jejaring dari anggota Posyandu atau petugas Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk menangani berbagai penyakit atau masalah kesehatan lain, tidak hanya sebagai tempat penanganan kesehatan ibu dan balita

Rekomendasi

- Posyandu Jiwa perlu mendapatkan perhatian yang cukup sebagaimana Posyandu reguler, seperti ketersediaan tempat, obat-obatan dan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan kader Posyandu sehat jiwa.
- Pentingnya membangun jejaring dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan aktivitas agar berjalan lebih baik.

Kontak Informasi

Soebagijono, Pengelola Posyandu Jiwa “Damar Wulan”

HP. 081 333 757 501

KONTRAK SEHAT

DENGAN KELUARGA BGM

Inovator
Pelaksana Kegiatan GSC

Lokasi
Desa Lanci Jaya, Manggelewa, Dompu

Guna memastikan berat badan anak yang telah ditangani tidak kembali turun di bawah garis merah (BGM), pelaku program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) berinisiatif membuat kontrak sehat dengan keluarga BGM yang telah dibantu. Hasilnya, berat badan sang anak kini tetap normal.

Latar Belakang

1. Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdiri dari 1319 Kepala Keluarga (KK), di mana sebanyak 641 KK (hampir setengahnya) termasuk kategori penduduk miskin.
2. Terdapat kasus-kasus gizi kurang dan balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) namun sering tidak teridentifikasi karena domisili warga yang jauh di lokasi-lokasi pertanian.
3. Pada bulan November hingga Maret, partisipasi masyarakat ke Posyandu menurun karena perhatian mereka terfokus pada pekerjaan di lahan pertanian.
4. Ditemukan seorang balita kurang gizi dari keluarga yang sangat miskin, di mana ibunya sedang bersiap menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Jakarta, ayahnya jarang di rumah karena pekerjaannya sebagai buruh, rumahnya yang dihuni 12 orang tidak memiliki sarana sanitasi, dan tidak memiliki cukup bahan makanan untuk kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga.
5. Balita tersebut mendapat penanganan hingga berat badannya kembali normal namun rentan untuk turun kembali

Upaya

Pembuatan kontrak untuk menjaga kesehatan anak antara Pelaksana Kegiatan program GSC (PK GSC) dan keluarga BGM

Manfaat

- Menjaga kesehatan anak
- Meningkatkan komitmen orang tua dalam menjaga kesehatan dan merawat anak

Proses

1. PK GSC berkoordinasi dengan Fasilitator Kabupaten (GCS) untuk mengevaluasi kondisi Desa Lanci Jaya.
2. Pihak GSC melakukan koordinasi dengan Puskesmas Soriutu untuk menganalisa situasi balita tersebut dan anggaran yang dapat digunakan.
3. Hasil analisa koordinator gizi menyimpulkan bahwa anak tersebut masuk kategori gizi buruk dan memberikan rekomendasi untuk penanganan kesehatannya.
4. Fasilitator Kecamatan (FK) GSC menghitung kebutuhan penanganan balita gizi buruk tersebut dan merevisi kegiatan Penyuluhan Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan menjadi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi buruk, kemudian dibawa ke musyawarah desa dan masyarakat yang hadir sepakat untuk merevisi kegiatan tersebut.
5. Puskesmas Soriutu mengkoordinasikan pemantauan perkembangan balita tersebut, termasuk alternatif-alternatif menu untuk membantu peningkatan gizinya. Pendamping Lokal (PL) selain memastikan bahwa makanan diberikan, tapi juga dikonsumsi dan ditunggu hingga dihabiskan oleh balita tersebut.
6. Intervensi dilakukan juga terhadap keluarga balita tersebut, melalui penyuluhan tentang menu sehat, pengelolaan makanan seimbang yang memanfaatkan sumber dari halaman rumah, tumbuh kembang anak, serta kebersihan rumah dan lingkungan.
7. Untuk menjaga status gizi balita tersebut, PK membuat kontrak dengan keluarganya yang menyebutkan kesanggupan menjaga kondisi gizi dengan memprioritaskan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita tersebut.
8. Kontrak yang berlaku hingga balita tersebut berusia 5 tahun memastikan terjadinya konsumsi makanan yang seimbang dan bersumber dari bahan makanan sekitar rumah, penjagaan terhadap kebersihan lingkungan rumah, peningkatan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan gizi anak.

Pelaku

Puskesmas Soriutu, FK GSC, PK, keluarga balita BGM

Pendanaan

Program Generasi Sehat dan Cerdas

Hasil

- Dalam 3 bulan, berat badan balita tersebut naik dari 5.2 kg menjadi 8 kg dan kondisi kesehatannya menjadi normal
- Kondisi balita tersebut mendapat perhatian dari ibunya yang segera memutuskan untuk kembali ke keluarganya

Rekomendasi

- Advokasi untuk rumah yang tidak layak huni agar dapat menggunakan Dana Desa melalui Program Bedah Rumah Kumuh
- Perlu keterlibatan berbagai pihak dalam memantau perkembangan balita gizi buruk yang bekerjasama dengan kader Posyandu setempat.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Zainal Abidin

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Dompu

Kontak : 081339790377

MODEL POSYANDU REMAJA

Inovator

Puskesmas dan Pelaku GSC Pajo

Lokasi

Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu

Guna menurunkan tingkat anemia pada remaja dan kecenderungan mengonsumsi obat-obat terlarang, warga di Kecamatan Pajo sepakat membentuk Posyandu Remaja. Dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja, di bawah binaan Puskesmas dan pelaku program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).

Latar Belakang

1. Berbagai kegiatan Posyandu sudah dilaksanakan namun belum optimal dalam prosesnya, antara lain persiapannya, penyediaan tempat, koordinasi antar pihak dan sasaran, ketersediaan bahan dan tenaga pelatih yang kurang menguasai materi
2. Kasus remaja yang mengalami anemia cukup tinggi
3. Kasus remaja yang menyalahgunakan zat adiktif dan obat-obatan terlarang sangat meresahkan
4. Masyarakat mengkhawatirkan remaja yang cenderung mengonsumsi obat terlarang maupun generik dalam jumlah yang melebihi dosis normal.

Upaya

Pembentukan Posyandu Remaja

Manfaat

- Memberi wadah bagi aktivitas remaja agar terhindar dari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan obat terlarang
- Menyediakan sarana penanganan dini remaja anemia/HB darah rendah

Proses

1. Fasilitator Kecamatan (FK) GSC menginisiasi koordinasi dengan penyedia layanan Posyandu untuk membahas sinergi kegiatan dan menyamakan persepsi. Saat itu yang ditemui adalah pimpinan Puskesmas Kecamatan Pajo, para dokter Puskesmas, koordinator bidan.
2. Dilakukan koordinasi juga dengan bidang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) untuk membahas kegiatan yang berkaitan dengan remaja, seperti kasus-kasus penyalahgunaan napza.
3. Tim Desa, yang terdiri atas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD), dan Pelaksana Kegiatan (PK) GSC melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas untuk membahas bagaimana meminimalisir jumlah remaja yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak sesuai dosis.
4. Dibentuk Kelas Remaja dan dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan fasilitator bagi remaja dan kelas terapi remaja untuk membantu memberikan pemahaman dan melakukan advokasi.
5. Dibentuk Posyandu Remaja untuk menaungi semua kegiatan tersebut pada 11 January 2017 dengan pola percontohan satu desa satu Posyandu yang dimulai dengan koordinasi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan Pajo dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), FK GSC, Penamping Lokal (PL), dan para pelaku di semua desa, seperti pemerintah desa dan pihak sekolah.
6. Di bawah koordinasi Puskesmas Ranggo Kecamatan Pajo, direkrut konselor/kader yang dapat melatih fasilitator remaja dan kader dalam bidang peningkatan kapasitas remaja.

Pelaku

Pelaku GSC, Kepala Puskesmas Ranggo Kec. Pajo, para bidan, remaja

Hasil

- Jumlah remaja yang mengalami anemia berkurang
- Kasus penyalahgunaan zat adiktif dan obat-obatan terlarang berkurang
- Remaja terhindar dari hal-hal negatif lain

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Zainal Abidin

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Dompu

Kontak : 081339790377

BPJS DESA MANDIRI

Inovator

Kader Posyandu Randu I – Dusun Tunggu Lawang

Lokasi

Desa Kuripan Selatan, Kuripan,
Lombok Barat

Warga desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat, merintis BPJS Desa mandiri pada Januari 2015. BPJS Desa ini dikelola oleh Organisasi Kesehatan Masyarakat (OKM) desa. Asas yang digunakan adalah gotong-royong antar warga empat dusun di Kuripan Selatan untuk saling membantu warga yang sakit mendapatkan perawatan kesehatan di Rumah Sakit.

Latar Belakang

1. Tidak semua warga, terutama warga miskin, memiliki BPJS
2. Kendati telah memiliki BPJS, banyak warga yang tidak mampu membayar iuran rutinnya
3. Kondisi tersebut dikeluhkan warga melalui aparat Desa
4. Desa dan masyarakat mencari solusi bersama

Upaya

Merintis BPJS Mandiri pada Januari 2014

Manfaat

1. Masyarakat miskin mendapatkan santunan secara langsung untuk biaya perawatan di pusat kesehatan atau Rumah Sakit
2. Masyarakat yang membutuhkan biaya perawatan/ pengobatan bisa mendapatkan santunan dengan mudah dan cepat, tanpa prosedur rumit
3. Masyarakat tidak terlalu resah dengan permasalahan biaya apabila mendapatkan musibah secara mendadak karena dikoordinasikan dan diarahkan dengan baik oleh petugas OKM
4. Keluhan masyarakat terkait BPJS dari Pusat sudah tidak terdengar karena sudah ada alternatif pembiayaannya
5. Menumbuhkan jiwa kegotong-royongan antar warga

Proses

1. Banyak warga desa yang mengeluhkan biaya perawatan di Rumah Sakit dan tidak memiliki BPJS
- 2) Perwakilan warga dan Desa kemudian mengumpulkan data terkait jumlah anggota masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu BPJS
- 3) Warga, tokoh masyarakat dan Desa melakukan pertemuan guna membahas permasalahan BPJS bersama para Ketua RT dan Kepala Dusun
- 4) Forum pertemuan tersebut mencetuskan keinginan dari masyarakat untuk mengembangkan kelompok gotong-royong yang sudah ada sebelumnya dan masih dipertahankan, seperti kelompok gotong-royong bangun rumah, kelompok gotong-royong perkawinan, kelompok gotong royong kematian, dan kini kelompok gotong -royong kesehatan

- 5) Setelah adanya kesepakatan untuk mengembangkan kelompok gotong-royong kesehatan maka muncullah ide untuk membuat OKM yang kegiatan utamanya mengelola program menyerupai BPJS dengan harapan semua masyarakat miskin dan kaya di desa dapat saling membantu dalam perawatan kesehatan apabila sakit
- 6) Ide tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan mendapat persetujuan
- 7) Warga kemudian membentuk kepengurusan OKM yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, dan Hubungan Masyarakat dengan anggota berasal dari warga desa
- 8) OKM melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai forum, baik keagamaan maupun pertemuan di desa, awik-awik
- 9) Penetapan awik-awik dan penerbitan Peraturan Desa
- 10) Penjaringan anggota

Mekanisme

1. Keanggotaan BPJS Desa Kuripan Selatan terbuka bagi semua warga desa Kuripan Selatan. Saat ini anggotanya mencapai 200 orang atau Kepala Keluarga
2. Masing-masing anggota secara gotong-royong mengumpulkan santunan masing-masing sebesar Rp 20.000 s/d Rp 25.000 kepada pengurus OKM setia bulan
3. Setiap anggota BPJS yang sakit atau ibu hamil yang melahirkan dihimbau melakukan pemeriksaan ke Puskesmas dan jika diperlukan rujukan ke Rumah Sakit Kabupaten dengan menyertakan surat rujukan
4. Anggota bisa mendapatkan santunan dengan menyampikan permohonan atau pemberitahuan kepada pengurus OKM untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada 200 anggota yang ada
 - a. Anggota BPJS Desa yang meninggal dunia di pusat kesehatan atau dalam perjalanan ke pusat kesehatan berhak mendapatkan santunan Rp 5.000.000
 - b. Anggota yang meninggal dunia di rumah (tidak dibawa ke pusat kesehatan) akan mendapatkan hak penanganannya dari kelompok gotong-royong kematian dan santunan kematian
 - c. Ibu hamil yang bersalin di pusat kesehatan atau Rumah Sakit, berhak mendapatkan santunan. Ibu hamil yang bersalin di paraji (dukun) dia tidak berhak mendapatkan santunan
 - d. Jika anggota yang dirawat di pusat kesehatan atau Rumah Sakit memiliki BPJS dari Pusat, yang bersangkutan berhak mendapatkan keduanya

Keanggotaan

1. Tercatat sebagai warga desa Kuripan Selatan
2. Mempunyai KTP
3. Sanggup mematuhi ketentuan yang diatur dalam awik-awik desa
4. Membayar iuran sebagai santunan bertanggung sebesar Rp 20.000 s/d Rp 25.000

Rekomendasi

1. Sosialisasi awal kepada masyarakat harus rasional
2. Warga masyarakat harus mempunyai sikap kegotong-royongan yang kuat
3. Pentingnya awik-awik sebagai dasar kesepakatan bersama menjadi ketentuan pelaksanaan BPJS Desa
4. Perlu ada pemutaran film keberhasilan OKM atau BPJS Desa ditempat lain sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk merespon terbangunnya BPJS Desa

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mukhlis

Jabatan : Fasilitator Kecamatan Generasi
Kontak : 087865789110

Marsam Suma

Jabatan : Sekretaris Desa Kuripan Selatan
Kontak : 081805203087

KELOMPOK PERDULI ASI DESA

Inovator

Kader Posyandu Randu I – Dusun Tunggu Lawang

Lokasi

Desa Kuripan Selatan, Kuripan,
Lombok Barat

Kader Posyandu Randu I, Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat, membentuk Kelompok Perduli ASI sejak awal 2014. Berkat kepedulian mereka, semua ibu yang memiliki bayi sejak 2014 telah memberikan ASI eksklusif, hasilnya berat badan bayi-bayi pun berada dalam kategori normal.

Latar Belakang

- 1) Ditemukannya bayi dengan kenaikan berat badan rendah, hanya 3 Ons pada hari Posyandu
- 2) Banyaknya ibu yang memberikan susu formula karena harus bekerja diluar rumah
- 3) Tingkat pendidikan para ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan masih rendah sehingga sebagian besar kurang paham akan pentingnya pemberian ASI eksklusif
- 4) Masih banyak ibu yang tidak peduli pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi tumbuh kembang bayi

Upaya

Membentuk Kelompok Perduli ASI pada Januari 2014

Manfaat

1. Ibu sasaran mengetahui dan memahami perbedaan memberikan ASI eksklusif dan susu formula beserta manfaatnya bagi tumbuh kembang bayi balita
2. Ibu sasaran tidak semaunya memberikan susu formula kepada bayinya meskipun dalam keadaan sibuk karena bekerja diluar rumah
3. 100 % Ibu yang memiliki bayi sejak 2014 memberikan ASI eksklusif
4. Kenaikan berat badan bayi relatif normal setiap
5. Kader lebih mudah menyampaikan pesan, melakukan pemantauan, sekaligus memberikan remedial atau teguran kepada sasaran jika ditemukan masalah

Proses

- 1) Kader mengidentifikasi penyebab rendahnya kenaikan berat badan bayi yang bermuara pada kebiasaan memberikan susu formula akibat kesibukan ibu
- 2) Kader menginformasikan permasalahan yang ditemukan kepada bidan Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Rukun Tetangga (RT)
- 3) Kader berinisiatif Kelompok Perduli ASI dan menyampaikan keinginan tersebut kepada para pemangku kepentingan
- 4) Kepala Desa menetapkan pembentukan Kelompok Perduli ASI ini secara resmi

- 5) Setelah mendapat persetujuan, para kader Posyandu yang terdiri atas lima orang berdiskusi untuk melakukan pembagian tugas mengikuti Pembagian Sasaran Posyandu yang telah diterapkan sebelumnya
- 6) Kader Posyandu dan Kepala Desa menyosialisasikan hal ini pada Rapat Desa yang dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat, dan menghimbau kepada semua dusun/posyandu untuk melakukannya

Keaggotaan

- Semua ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan
- Semua ibu sasaran Posyandu baik yang menggunakan ASI eksklusif maupun ASI formula, baik yang sedang menyusui maupun tidak

Program Kerja

1. Memberikan penyuluhan kepada kelompok peduli ASI secara periodik yang dilakukan oleh kader yang ditugaskan
2. Melakukan pemantauan setiap minimal seminggu sekali dan langsung melakukan remedial
3. Penyuluhan bidan pada hari Posyandu yang ditentukan tentang penting ASI eksklusif
4. Peremuan bulanan sesuai pelaksanaan Posyandu untuk membahas kemajuan dan permasalahan yang diterima atau ditemukan

Pembagian Tugas

Adapun pembagian tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dari kegiatan ini dilakukan berdasarkan Pembagian Kelompok Sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati, dimana setiap kader bertanggung jawab atas sasaran yang ada di sekitar rumahnya. Pembagian area sasaran sendiri dilakukan melalui musyawarah.

Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Pada minggu-minggu awal, ibu bayi perlu diberikan pemahaman lebih intensif karena cenderung ngeyel dan memberikan susu formula asal bayinya tidak rewel
2. Membutuhkan pendekatan dan proses yang lebih pribadi dalam memberikan pemahaman
3. Masih ditemukan ibu yang mencuri-curi kesempatan memberikan susu formula dengan alasan kesibukan bekerja

Rekomendasi

Beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Sosialisasi diperbanyak baik melalui poster dan pertemuan langsung
2. Para kader perlu diberikan pelatihan terkait pendampingan sasaran dan pemahaman tentang pentingnya ASI eksklusif
3. Perlu dilakukan pembagian kelompok sasaran, rencana kerja dan pembagian tugas pendampingan yang jelas dan tertuang dalam AD/ART
4. Perlunya dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mukhlis

Jabatan : Fasilitator Kecamatan Generasi
Kontak : 087865789110

Sri Santiani

Jabatan : Ketua PKK, Kader Posyandu
Kontak : 087865352987

KONSELOR SEBAYA

DALAM BIDANG KESEHATAN

Inovator

Hardiani Ela Wahjuni, Konselor Sebaya
Radio Komunitas desa Lingsar

Lokasi

Desa Lingsar, Lingsar, Lombok Barat

Warga desa Lingsar, kecamatan Lingsar, Lombok Barat, memiliki Konselor Sebaya yang bertugas menyampaikan informasi mengenai kesehatan remaja, termasuk seksualitas dan pubertas melalui siaran Radio Komunitas yang dikelola warga di bawah naungan Pemerintah Desa.

Kini, perilaku hidup bersih dan sehat warga, terutama remaja, meningkat, dan sejumlah remaja usia pubertas tercatat mengikuti aktif kegiatan-kegiatan yang dikelola radio dan desa.

Latar Belakang

- 1) Banyak anak menginjak remaja dengan perubahan fisik dan pola pikir
- 2) Perlu upaya meningkatkan pengetahuan, pola pikir dan pola pergaulan remaja
- 3) Perlu upaya mengedukasi remaja akan bahaya pergaulan bebas

Upaya

Membentuk Seksi Pendidik Sebaya atau Konselor Sebaya di Radio Komunitas Darling FM

Manfaat

- 1) Menyiapkan remaja menghadapi dan melewati masa pubertas
- 2) Menyebarkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, masalah seksualitas, HIV/Aids, Napza
- 3) Jangkauan hingga ke pelosok, sehingga dapat menyampaikan informasi seputar pendidikan dan kesehatan bagi remaja dan masyarakat di pelosok
- 4) Menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Proses

- 1) Berawal dari kegemaran pemuda-pemudi desa dalam berbagi informasi
- 2) Pemerintah Desa Lingsar membentuk Karang Taruna "Solah Soloh Soleh" sekaligus menyediakan sarana untuk berekspresi dalam berbagi informasi, yakni Radio Komunitas Darling, pada April 2013. Darling singkatan dari Duta Angkasa Rakyat Lingsar
- 3) Pembentukan kepengurusan yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta dua seksi kegiatan, yakni Seksi Program, Seksi Pendidik Sebaya
- 4) Membuat program kerja
 - a. Dalam studio: menyampaikan materi yang diperoleh dari diklat pendidik sebaya atau konselor sebaya, yang disampaikan dalam siaran radio. Isinya berupa isu-isu seksualitas, HIV/Aids, dan Napza yang disampaikan dengan Bahasa sederhana (bahasa sasak) agar mudah dipahami
 - b. Luar studio: memberikan pelatihan dan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan kelompok pemuda-pemudi, baik dalam pola hidup bersih dan sehat, pergaulan, serta kegiatan ekonomi (pembuatan tas tali kur, konveksi sederhana dan sablon, cuci motor, ukiran kayu, dan lain-lain)

Pelaku

- Pemerintah Desa
- Pemuda-pemudi Desa

Pendanaan

Bekerjasama dengan Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penyediaan informasi

Hasil

1. Meski belum terukur secara kualitatif, namun dilihat dari perilaku hidup bersih dan sehat warga desa terutama remaja, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi remaja (KRR) relatif meningkat.
2. Sejumlah remaja usia pubertas tercatat mengikuti kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan mereka dapat menghadapi dan melewati masa pubertas dengan baik
3. Menurunnya kasus pernikahan dini

Pembelajaran

Anak terkadang merasa sungkan bertanya terkait hal sensitive termasuk kesehatan reproduksi dan pubertas. Sebaliknya, banyak orangtua yang merasa risih menjawab pertanyaan anak seputar itu. Pada kondisi tersebut, konselor sebaya dapat berperan dalam memberikan pengarahan kepada remaja terkait pentingnya kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan pubertas.

Rekomendasi

- Orangtua tetap harus memberikan perhatian pada tumbuh kembang anak, termasuk ketika mereka menginjak remaja dan memasuki masa pubertas
- Konselor sebaya harus mendapatkan pelatihan tambahan dan diusulkan memegang sertifikat untuk memberikan konseling bagi rekan sebayanya.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Sulhayani

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Barat

Kontak : 0819184185542

MENGHIDUPKAN KEMBALI

TABULIN

Inovator

Kader Posyandu Randu I – Dusun Tunggu Lawang

Lokasi

Desa Kuripan Selan, Kuripan,
Lombok Barat

Warga dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat, sepakat untuk menghidupkan kembali Tabungan Persalinan (Tabulin) mulai 2014. Hingga saat ini, terdapat 25 rumah tangga yang telah menerima manfaatnya.

Berkat tabungan ini, bukan hanya ibu hamil yang terbantu, melainkan juga kelompok wanita lain. Terdapat lima orang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) yang turut memanfaatkan dana Tabulin melalui kegiatan simpan pinjam. Hingga tahun ini, mereka mengelola tabulin sekitar Rp 5,7 juta.

Latar Belakang

1. Terdapat sejumlah ibu hamil yang tidak memiliki BPJS atau Jaminan Persalinan (Jampersal), sehingga dikenakan biaya persalinan Rp 60.000
2. Jika pun memiliki BPJS namun mereka tak mampu membayar iuran rutinnya
3. Ibu hamil dari keluarga miskin yang tidak memiliki biaya untuk perlengkapan bayi dan biaya setelah persalinan
4. Diantara para ibu hamil ditinggalkan suaminya keluar negeri mencari nafkah dengan penghasilan tidak tetap
5. Membutuhkan dana pasca persalinan untuk kegiatan ritual seperti pemeberian nama, syukuran/cukuran, dan lain-lain

Upaya

Menghidupkan kembali Tabungan Persalinan (Tabulin)

Manfaat

- Ibu hamil memiliki cadangan dana untuk persiapan persalinan, bahkan dana tambahan pembiayaan kebutuhan bayi
- Keluarga ibu hamil memiliki cadangan dana untuk ritual pasca persalinan
- Ibu hamil lebih tenang dan terbantu
- Menjalin semangat kegotong-royongan
- Menumbuhkan usaha anggota KWT

Proses

1. Saat kunjungan Posyandu, kader Poyandu Randu I mengajak ibu hamil berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi menjelang persalinan dan paska-persalinan;
2. Dari jawaban ibu hamil, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mereka mengeluhkan biaya persalinan dan biaya yang mungkin timbul paska-persalinan, termasuk biaya untuk syukuran kelahiran anak;

3. Berdasarkan jawaban tersebut, para kader Posyandu Randu I berdiskusi mencari solusi, hingga sepakat untuk menawarkan Tabungan Persalinan (Tabulin) kepada para ibu hamil;
4. Pada Posyandu berikutnya, Tabulin pun ditawarkan kepada para ibu hamil dan diminati;
5. Kader Posyandu dan para ibu hamil kemudian bermusyawarah untuk menentukan besaran tabungan, serta proses pengelolaannya;
6. Musyawarah penetapan besaran Tabulin, pengelolaan dan penyalurannya.

Mekanisme Pengelolaan

1. Kepesertaan Tabulin diprioritaskan bagi ibu hamil pada kehamilan pertama, dengan tujuan untuk pendampingan dan memberikan motivasi;
2. Berdasarkan musyawarah bersama ibu hamil, kader Posyandu dan bidan, ditetapkan besaran tabungan Rp 5.000 – Rp 20.000 per bulan, tergantung kemampuan ibu hamil;
3. Tabungan disetorkan kepada pengelola Tabulin setiap hari Posyandu;
4. Tabulin di Posyandu Randu I dikelola langsung oleh Kader Posyandu Randu I yang didampingi oleh bidan;
5. Pengelola Tabulin menyiapkan buku Tabungan atau bukti tabungan sederhana untuk setiap peserta tabulin;
6. Peserta membawa buku/bukti tabungan setiap akan menabung;
7. Dana yang terkumpul diintegrasikan dengan KWT untuk dikembangkan melalui cara simpan-pinjam dengan mekanisme bagii-hasil;
8. Peserta dapat mencairkan tabungan pada saat persalinan atau paska-persalinan;
9. Pengelola melakukan pelaporan pelaksanaan Tabulin, termasuk penggunaan dana, setiap hari Posyandu. Kegiatan pelaporan ini, selain sebagai kontrol pengelolaan Tabulin, juga menjadi alat sosialisasi bagi sasaran Posyandu.

Tantangan

Terjadi penolakan oleh beberapa ibu hamil dengan alasan tidak memiliki uang atau khawatir bila membawa uang saat Posyandu, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti musyawarah.

Rekomendasi

1. Sosialisasi awal harus dilakukan kepada semua ibu hamil, bahkan masyarakat.
2. Perlu dikembangkan semacam Reward bagi peserta yang mendapatkan tabungan terbanyak dan diumumkan saat posyandu agar menjadi daya tarik.
3. Perlu menunjukkan pengelolaan yang transparan dan bertanggungjawab untuk menghilangkan keraguan peserta.
4. Perlu dipertimbangkan jemput bola bagi peserta yang khawatir membawa uang keluar rumah.
5. Kader Posyandu harus memberikan pertimbangan melalui belajar dari pengalaman di tempat lain agar ibu hamil dan keluarganya dapat tertarik dan merasa yakin.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mukhlis

Jabatan : Fasilitator Kecamatan Generasi
Kontak : 087865789110

Sri Santiani

Jabatan : Ketua PKK , kader Posyandu dan
KPMD GSC
Kontak : 087865352987

MENUMBUHKAN **MINAT BACA** DI DESA

Inovator

M. Anshari dan Ust. Qawawir warga Desa Kekait

Lokasi

Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari,
Lombok Barat

Warga desa Kekait berinisiatif menumbuhkan minat baca bagi anak-anak dan masyarakat dengan membentuk komunitas Laskar Baca pada 2015. Berbagai fasilitas dan kegiatan membaca disediakan. Hasilnya, kegiatan anak-anak diluar sekolah relatif bermanfaat, kegemaran membaca meningkat, dan kemampuan membaca anak relatif meningkat.

Latar Belakang

1. Banyak orangtua di desa yang menilai pendidikan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, sementara orangtua hanya bertanggung jawab terhadap pada kebutuhan materi keluarga
2. Orangtua cenderung mengabaikan jam bermain anak, pergaulan dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak, bahkan banyak anak yang lupa pulang karena asyik bermain game
3. Ada sejumlah anak kelas 3 SD belum bisa membaca dan menulis
4. Pergaulan bebas berpotensi menyumbang meningkatnya angka pernikahan dini dan putus sekolah pada anak

Upaya

Inisiasi program menumbuhkan minat baca bagi anak-anak di desa sejak Mei 2015

Manfaat

1. Memberikan ruang belajar tambahan yang bertanggung jawab bagi anak-anak di desa
2. Menumbuhkan gemar membaca pada anak-anak
3. Mengembangkan kreativitas warga desa

Proses

1. Mahasiswa dan ustadz berinisiatif mendirikan perpustakaan di lahan pribadi
2. Semangat ini ditularkan kepada pemuda-pemudi desa lainnya melalui diskusi atau ngobrol-ngobrol santai, hingga terbentuklah sebuah komunitas baca
3. Komunitas sepakat membuat basecamp sekaligus perpustakaan, sekretariat dan tempat belajar masyarakat di dusun Kekait Taebah
4. Komunitas membuat program kerja atau kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
5. Dengan semakin banyaknya dukungan dari pemuda-pemudi, bahkan dari luar dusun, Komunitas ini membuat Kepengurusan sederhana, terdiri atas Ketua Umum, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Hubungan Masyarakat.

Kegiatan

- Pendidikan: bimbingan belajar membaca dan menulis bagi anak-anak, bimbingan belajar Bahasa Inggris, matematika dan pengembangan kreativitas anak, perpustakaan dengan berbagai buku cerita, buku bergambar, crayon untuk menggambar, berbagai lomba dan dongeng
- Kesehatan: konseling kesehatan, pemeriksaan hepatitis, pengecekan golongan darah, pengobatan gratis, donor darah
- Ekonomi: budidaya jamur dan kripik pisang

Pelaku

Pemuda-pemudi warga desa Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat. Saat ini keanggotaan mencapai lebih dari 60 orang dengan berbagai profesi: guru, dokter, perawat, arsitek, mekanik, guide wisata dan mahasiswa.

Pendanaan

- Operasional harian berasal dari swadaya anggota
- Acara atau kegiatan didukung sponsor pihak ketiga

Hasil

- Kegiatan anak-anak diluar sekolah relatif terkontrol dan bermanfaat
- Kegemaran membaca meningkat
- Kemampuan membaca anak meningkat
- Angka pernikahan dini relatif berkurang

Rekomendasi

Mendirikan komunitas Solusi seperti badan kontrak perlu menjadi alternatif bagi penanganan pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi terisolasi.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Sulhayani

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Barat

Kontak : 0819184185542

PEMBAGIAN SASARAN

POSYANDU

Inovator

Kader Posyandu Randu I – Dusun Tunggu Lawang

Lokasi

Desa Kuripan Selatan, Kuripan,
Lombok Barat

Kader Posyandu Randu I, Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat, berinisiatif melakukan pembagian sasaran Posyandu untuk meningkatkan angka kehadiran sasaran di Posyandu. Hasilnya, angka sweeping kini NOL dan tingkat kehadiran sasaran di Posyandu bertahan di 100%.

Latar Belakang

- 1) Tingkat kehadiran sasaran di Posyandu rendah, hanya 30-50% setiap Posyandu
- 2) Kesadaran orangtua untuk membawa anak balita ke Posyandu rendah
- 3) Orangtua hanya mau datang ke Posyandu jika ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Upaya

Melakukan Pembagian Sasaran Posyandu sejak 2015

Manfaat

1. Menjamin tingkat kehadiran sasaran tetap tinggi
2. Menjaga kualitas kesehatan anak dan ibu – mengantisipasi terjadinya kasus balita di bawah garis merah (BGM) dan gizi buruk, serta ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK)
3. Meningkatkan aktivitas kader diluar hari Posyandu

Proses

- 1) Kader Posyandu berdiskusi bagaimana cara efektif untuk meningkatkan angka kunjungan sasaran ke Posyandu
- 2) Tersebersit ide untuk melakukan pembagian sasaran. Ide tersebut dimatangkan oleh para kader yang berjumlah lima orang
- 3) Pembagian sasaran dilakukan dengan cara setiap kader bertanggung jawab atas kehadiran di Posyandu dan kondisi kesehatan sasaran di sekitar rumahnya
- 4) Para kader kemudian membuat peta kewilayahan untuk memperkirakan posisi rumah setiap kader
- 5) Berdasarkan peta tersebut, kader menyepakati pembatasan area jangkauan dan segera mengidentifikasi dan mendata jumlah sasaran yang tinggal di area jangkauannya. Dari hasil itu diketahui, misalnya, kader 1 memiliki 27 sasaran, kader 2 memiliki 17 sasaran, dan seterusnya
- 6) Setelah memperoleh jumlah sasaran di area masing-masing, kader membuat Buku Nama Sasaran yang terdiri atas: Nama anak, jenis kelamin anak, nama orangtua, jenis layanan yang diperoleh anak, serta kolom catatan bulanan (Januari-Desember) yang dibagi menjadi empat: umur, berat badan, tinggi badan dan kode status. Kode status ini menjadi barometer apakah berat badan sasaran naik, turun atau tetap

- 7) Setiap kader juga menyiapkan kartu-kartu berisi: nama sasaran, nama ayah dan nama ibunya. Kartu tersebut dibagikan kepada sasaran sehari sebelum hari Posyandu (setiap H-1 Posyandu). Kartu ini berfungsi sebagai kartu pendaftaran dan dapat mempermudah kader mengidentifikasi sasaran yang tidak atau belum datang
- 8) Jika hingga jam 11 hari Posyandu sasaran belum tiba, maka kader yang bertanggung jawab pada sasaran tersebut akan menjemput bola dan membawa sasaran untuk ditimbang atau mendapat pemeriksaan kesehatan di Posyandu

Pelaku

Kader Posyandu

Pendanaan

Sukarela

Hasil

1. Tingkat kehadiran sasaran di Posyandu 100%
2. Angka sweeping NOL
3. Bayi dengan berat badan BGM NOL
4. Bayi dengan gizi buruk atau kekurangan gizi NOL
5. Ibu dengan KEK dapat ditangani dengan baik dan melahirkan anak sehat dengan berat-badan normal

Rekomendasi

1. Kader Posyandu harus kompak dan memiliki jiwa kerelawanan yang tinggi
2. Kader harus dapat bersosialisasi dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan keluarga sendiri, serta kuarga sekitar, terutama kesehatan bayi-balita dan ibu hamil

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mukhlis

Jabatan : Fasilitator Kecamatan Generasi

Kontak : 087865789110

Sri Santiani

Jabatan : Ketua PKK, Kader Posyandu

Kontak : 087865352987

Inovator

UPTD BLUD Puskesmas Kuripan

Lokasi

Kecamatan Kuripan, Lombok Barat

UPTD BLUD Puskesmas Kuripan membuat Kampung Gizi sebagai upaya tanggap darurat gizi buruk setelah ditemukan 202 kasus gizi buruk, balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan gizi kurang di kecamatan Kuripan.

Berkat upaya tersebut, kini kasus BGM dan gizi buruk menjadi NOL.

Latar Belakang

- Berdasarkan hasil sensus penimbangan di Posyandu di Kecamatan Kuripan pada Maret 2016, diketahui terdapat 101 balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM), 11 kasus gizi buruk dan 90 balita gizi kurang
- Banyak keluarga belum menerapkan jam makan teratur untuk balita
- Kurang memperhatikan asupan gizi bagi balita dan cenderung memberi makanan apasaja asal anak tidak rewel

Upaya

Menerapkan status tanggap darurat gizi buruk bagi dusun-dusun dengan jumlah kasus terbanyak, serta melakukan penanganan kasus secara terfokus dengan membentuk Kampung Gizi.

Manfaat

- Memberikan penanganan secara tanggap terhadap semua kasus gizi buruk, BGM dan balita gizi kurang
- Memberikan pembelajaran bagi keluarga/orangtua akan pentingnya menerapkan jam makan teratur bagi balita
- Memberikan referensi jenis makanan sehat dan asupan gizi seimbang bagi tumbuh kembang balita

Proses

- 1) Mengidentifikasi desa-desa dengan kasus tertinggi
- 2) Membentuk Tim Penanggungjawab yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring Kampung Gizi:
 - a. Penanggung Jawab Kecamatan yang disebut Tim Kecamatan yaitu Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Kepala UPTD Dikbud, Kepala Penyuluh Pertanian, PKK, Muspika dan Fasilitator program Generasi Sehat Cerdas (GSC)
 - b. Penanggung Jawab Desa/Tim desa yaitu Kepala desa, Sekdes, PMD, PKK, Bidan desa, Puskesmas Pembantu, Pembina Wilayah Desa, dan Pendamping Lokal GSC
 - c. Penanggung Jawab Dusun/Tim Dusun terdiri atas Kepala Dusun, Ketua RT dan semua kader Posyandu dan Dasa Wisma

- 3) Menunjuk tiga desa dengan jumlah kasus tertinggi untuk diberikan penanganan intensif melalui pemberian makanan tambahan (PMT) selama 90 Hari Makan Anak (HMA)
- 4) Tidak memberikan bahan mentah kepada keluarga sasaran
- 5) Berkoordinasi dengan kader Posyandu dan meminta kader mengolah makanan sekaligus mendistribusikannya kepada sasaran
- 6) Menunjuk kader pendamping untuk mengawal pemberian PMT dan memastikan PMT diterima oleh sasaran
- 7) Mendorong para pihak untuk turut melakukan pemantauan pemberian PMT

Pelaku

Semua unsur masyarakat mulai dari warga, kader Posyandu, kader Posyandu, RT, Kadus, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Bidan Puskesmas

Pendanaan

Adanya kesepakatan pembiayaan untuk intervensi kasus melalui dana GSC TA 2015, ADD dan pendapatan fungsional Puskesmas Kuripan

Hasil

Hasil akhir yang didapatkan setelah intervensi selama 3 bulan untuk 3 desa maka diperoleh data bahwa BGM dan Gizi Buruk menjadi NOL.

Pembelajaran

- Penerapan konsep kampung gizi yang dilakukan sebagai uji coba di kecamatan Kuripan dalam menangani kasus BGM dan Gizi Buruk ini, dapat dijadikan lesson plan bagi desa-desa lain, khususnya di kecamatan Kuripan apabila terdapat kasus yang sama

Rekomendasi

- Tim yang sudah terbentuk, mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat dusun perlu diperkuat dan dipertahankan, salah satunya melalui pendekatan minilokakarya
- Untuk pembiayaan, perlu koordinasi yang intensif dengan pihak desa/Tim 11, terutama pada saat penyusunan RPJMdesa/RKPdesa agar dapat dianggarkan sebagai upaya tanggap darurat gizi buruk

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mukhlis

Jabatan : Fasilitator Kecamatan Generasi
Kontak : 087865789110

Rohayati S.Si

Jabatan : Kepala UPTD BLUD Puskesmas
Kuripan
Kontak : 087864945634

BANK DARAH

UNTUK IBU HAMIL

Inovator

Pemerintah Desa Pengenjek

Lokasi

Desa Pengenjek, Jonggat, Lombok Tengah

Pemerintah Desa Pengenjek, Jonggat, Lombok Tengah, berinisiatif membuat Bank Darah untuk menjamin ketersediaan darah bagi warga desanya, terutama wanita hamil, guna menghindari dampak negatif dari kekurangan darah.

Latar Belakang

- 1) Salah satu permasalahan yang sering terjadi di desa Pengenjek adalah banyaknya ibu hamil yang menderita anemia hingga harus dirujuk dan ditangani intensif di Rumah Sakit
- 2) Banyak ibu hamil dan warga yang dioperasi membutuhkan transfusi darah
- 3) Kurangnya cadangan darah di UPT transfusi darah maupun Palang Merah Indonesia (PMI)
- 4) Sulitnya mencari pendonor darah ketika sedang dibutuhkan

Upaya

Pada tahun 2010 Desa Pengenjek membuat Bank Darah (sukarela)

Manfaat

- 1) Membantu mempermudah para ibu hamil yang membutuhkan darah pada saat melahirkan di Rumah Sakit, juga warga lain
- 2) Menurunkan faktor angka kematian warga, terutama ibu hamil karena kekurangan darah
- 3) Menjamin ketersediaan darah pada saat dibutuhkan

Proses

- 1) Kader Posyandu dan bidan desa melaporkan perihal kasus-kasus akibat kekurangan cadangan darah kepada desa
- 2) Dalam dialog antara Desa dengan bidan desa dan kader Posyandu disepakati untuk mulai dibentuk Bank Darah yang dilandasi oleh kesukarelaan warga
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak UPT transfusi darah di Rumah Sakit Kota Praya terkait rencana pembuatan Bank Darah dan donor darah dan menyepakati jadwal donor darah
- 4) Desa, Kader Posyandu dan bidan desa melakukan sosialisasi intensif ke semua dusun akan pentingnya donor darah untuk menyelamatkan ibu hamil dan warga lain yang membutuhkan
- 5) Pada tahap awal (uji coba), donor darah dilakukan pada para suami yang istrinya sedang hamil dan mengalami anemia, yakni sebanyak 33 orang
- 6) Pengambilan darah dilakukan oleh petugas dari RSU Praya sebanyak 22 ml per kantong (satu orang bisa 1 – 2 kantong tergantung kondisi)
- 7) Darah dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa apakah darah tersebut memenuhi syarat untuk didonorkan serta aman dari penyakit
- 8) Pihak desa mendapatkan laporan dari pihak UPT transfusi darah mengenai jumlah darah yang memenuhi persyaratan dan layak untuk digunakan sebagai cadangan darah yang akan dimanfaatkan oleh orang lain

Pelaku

Pemerintah Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, UPT Transfusi Darah RSUD Praya

Pendanaan

Tidak memerlukan pendanaan

Hasil

- Kebutuhan darah ibu hamil dan warga lain relatif terpenuhi
- Turunnya angka kematian ibu melahirkan karena kekurangan darah

Rekomendasi

Setiap desa dapat menjalankan program donor darah ini karena proses, prosedur dan langkah koordinasinya pun mudah, terlebih jika mengingat kebutuhan darah dari semua lapisan masyarakat di Indonesia sangat tinggi sedangkan saat ini jumlah darah yang ada sebagai cadangan sangat terbatas.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Irawan Susiandi

Jabatan : Kepala Desa Pengerjek

Kontak : 081803762491

Inovator

PK GSC Desa Barabali

Lokasi

Desa Barabali, Kecamatan Batukliang,
Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksana Kegiatan program Generasi Sehat dan Cerdas (PK GSC) berhasil membuka dan mempersatukan jejaring, dari lokal hingga internasional, dalam membantu anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan kesehatan. Hasilnya, sang anak memperoleh pelayanan optimal dan kolaborasi antarpihak pun terjalin sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan maksimal.

Latar Belakang

1. Desa Barabali terletak 2 km di sebelah selatan kota kecamatan dengan mata pencaharian penduduk yang bervariasi seperti pedagang, PNS, dan petani
2. Di dusun Lingkok Kudung ditemukan seorang anak yang dibuang di pematang sawah dan kemudian diasuh oleh seorang petani setempat
3. Bayi tersebut memiliki kelainan pada mata dan hidungnya sehingga petani tersebut memberitahunya kepada PK GSC Desa Barabali agar mendapat bantuan

Upaya

Mempersatukan jejaring untuk memberikan pelayanan inklusi

Manfaat

1. Sumber informasi untuk memberikan masukan akan pelayanan yang dapat digunakan untuk membantu warga
- 2) Terbentuk jalinan kerjasama dengan sebuah yayasan dan pihak-pihak rumah sakit sebagai inisiasi untuk kerjasama lainnya bila diperlukan
- 3) Penderita inklusi bisa mendapatkan bantuan dan penanganan

Proses

1. PK GSC Barabali mencari informasi tentang Yayasan Senyum di Bali yang berfokus pada pemberian bantuan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK)
2. Dilakukan rapat koordinasi antara Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan PK setiap bulannya untuk bertukar informasi sehingga ditemukan nomor kontak Yayasan Senyum
3. Keluarga asuh anak tersebut tidak memiliki KTP, KK, Kartu Miskin, maupun kartu BPJS sehingga perlu fasilitasi dari pelaku GSC desa
4. Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, Yayasan Senyum kembali dihubungi dan langsung datang untuk melihat kondisi sang anak. Pihak Yayasan Senyum menyetujui untuk pembiayaan operasi anak tersebut
5. Tim GSC mendampingi keluarga petani tersebut dalam pemeriksaan awal di Puskesmas Mantang

6. Penderita mendapatkan rujukan ke RS Bodak, RS Praya, dan rumah sakit provinsi, serta mendapatkan bantuan transportasi dan tenaga pendamping
7. Pemeriksaan dan operasi melalui beberapa tahap, yakni di RS Sanglah, Denpasar, Bali hingga di Australia, yang seluruhnya difasilitasi oleh Yayasan Senyum dan dibantu kelengkapan administrasinya oleh PK GSC

Pelaku

PK GSC, petani bernama Amaq Warni, KPMD, Yayasan Senyum

Hasil

- 1) Anak berkebutuhan khusus dapat menerima layanan maksimal
- 2) Terjalin kolaborasi antarpihak dalam merealisasikan pemberian layanan

Rekomendasi

- 1) Perlu dilakukan koordinasi antara para pelaku dan pihak desa, dengan FK dan pelaku GSC kecamatan, Puskesmas, lembaga-lembaga lokal dan jejaring yang memiliki kepedulian
- 2) Perlu berbagi tugas dalam mengidentifikasi masalah termasuk kelengkapan administrasi warga masyarakat.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hidayatul F

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Kontak : 0818367117

Inovator

Pemerintah Desa Pongenjek

Lokasi

Desa Pongenjek, Jonggat,
Lombok Tengah

Pemerintah Desa Pongenjek, Jonggat, Lombok Tengah, mengalokasikan dana desa untuk keberlanjutan program parenting sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, selain kader desa memiliki kemampuan di bidang konseling, para orangtua juga memiliki referensi dalam menerapkan pola asuh anak yang mendidik sebagai penerus bangsa.

Latar Belakang

1. Kekhawatiran akan lahirnya indikasi karakter anak yang kurang baik, antara lain kegiatan generasi muda yang cenderung bebas, pernikahan dini, perceraian di usia muda, dan lain sebagainya
2. Diperlukan upaya untuk mengarahkan karakter generasi muda melalui orangtua sebagai salah satu pembentuk karakter anak.
3. Kemampuan individu orangtua dalam menerapkan pola asuh yang baik masih perlu ditingkatkan
4. Pola asuh yang dilakukan selama ini belum diaplikasikan dalam bentuk pendidikan kepada anak

Upaya

Melakukan program pemberdayaan masyarakat khusus parenting guna meningkatkan kemampuan orangtua dalam mendidik dan membentuk karakter baik anak sejak dini.

Manfaat

- 1) Meningkatkan kapasitas kader dan fasilitator
- 2) Memberikan referensi bagi masyarakat/orangtua dalam menerapkan pola asuh yang baik dan mendidik
- 3) Mendukung upaya permasalahan nasional dan global terkait pembentukan karakter anak

Proses

- 1) Memberikan pelatihan-pelatihan bagi kader untuk menjadi konselor sekaligus evaluator dibidang parenting berdasarkan kurikulum konselor pasangan ramah anak (Parana) dan panduan dari BKKBN, BP3AKB, Kementerian Agama, DIKPORA dan lain-lain
- 2) Pengumpulan data sasaran dan pendampingan, terutama orangtua yang sedang hamil dan/atau memiliki anak di bawah 2 tahun
- 3) Konselor memberikan konseling dan pendampingan kepada sasaran, terutama dalam mengenali dan mempelajari karakter anak, serta bagaimana mengembangkannya menjadi pola asuh yang baik sejak dini
- 4) Sasaran diberikan pengetahuan cara stimulasi anak berdasarkan usia tumbuh-kembang anak

- 5) Para orangtua berkonsultasi kepada kader atau bidan jika melihat hal tidak biasa terjadi pada anak, termasuk jika anak lambat merespons sesuatu yang seharusnya sudah dapat dilakukan anak seusianya
- 6) Kader melakukan pemantauan dengan dibekali formulir pemantauan terhadap orangtua dan anak, serta buku pemantauan stimulasi anak yang dikeluarkan oleh BP3AKB

Pelaku

Kader Posyandu, warga Desa Pengerjek, orangtua yang sedang hamil atau memiliki anak di bawah usia lima tahun, para pelatih

Pendanaan

APBDesa

Hasil

- Tercipta pola asuh yang baik untuk anak-anak di Desa Pengerjek
- Terbentuk konselor pasangan ramah anak (Parana) tingkat desa

Rekomendasi

- Pembentukan karakter anak agar dilakukan sejak dini
- Konselor desa dapat dibentuk melalui kader-kader Posyandu yang dilatih
- Diperlukan dukungan semua pihak demi kelancaran dan keberlanjutan program parenting

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hidayatul F

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Kontak : 0818367117

MEMAKSIMALKAN POTENSI DESA UNTUK PENDIDIKAN

Inovator

Pemerintah Desa Rensing Raya

Lokasi

Desa Rensing Raya, Sakra Barat,
Lombok Timur

Pemerintah Desa Rensing Raya, Sakra Barat, Lombok Timur, berinisiatif memanfaatkan lahan tidur milik desa untuk dijadikan Sekolah Alam guna memberikan kegiatan tambahan yang positif bagi anak-anak setelah pulang sekolah.

Latar Belakang

1. Adanya keprihatinan warga akan kegiatan anak-anak setelah pulang sekolah yang hanya bermain dan kurang terkontrol
2. Anak-anak kurang peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar
3. Anak-anak kurang paham dan peduli tentang pola hidup bersih dan sehat

Upaya

Memaksimalkan potensi desa untuk pendidikan anak, terutama diluar jam sekolah, dengan membuat Sekolah Alam

Manfaat

1. Anak-anak lebih dekat dan dapat mengenali lingkungan dan alam sekitar
2. Mendidik tata krama atau sopan santun anak terhadap sesama dan alam
3. Mendorong anak cepat mandiri
4. Memanfaatkan lahan tidur milik desa untuk kemajuan melalui Sekolah Alam yang memberikan pendidikan anak diluar jam sekolah
5. Menciptakan lapangan kerja bagi warga desa

Proses

1. Adanya inisiatif dari Kepala Desa Rensing Raya dan Fasilitator Desa
2. Sosialisasi dengan Lembaga yang ada di desa sekaligus merumuskan ide dan mekanisme dalam memaksimalkan potensi desa untuk pendidikan anak diluar jam sekolah
3. Pembentukan kepengurusan
4. Perekrutan staf pengajar dan staf lainnya. Staf pengajar atau guru adalah sarjana warga Rensing Raya yang baru menyelesaikan study atau belum mendapat pekerjaan, guru-guru yang ada di desa Rensing Raya, guru tamu dari luar desa yang secara sukarela menawarkan diri ikut memfasilitasi, dan staf Pemerintah Desa.
5. Koordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan program belajar di Sekolah Alam
 - a. Kegiatan Sekolah Alam dilaksanakan 2X seminggu (Selasa dan Jumat)
 - b. Selasa untuk anak Kelas 1-3 Sekolah Dasar
 - c. Jumat untuk anak Kelas 4-6 Sekolah Dasar
6. Sosialisasi kepada orangtua wali akan pentingnya Sekolah Alam yang akan di Laksanakan
7. Pendekatan terhadap calon peserta didik "Door to Door"

Kepengurusan

- 1) Kepengurusan terdiri atas: Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas
- 2) Untuk bagian akademik, dibentuk struktur yang terdiri atas: Kepala Sekolah, Sekretaris, Bandahara, Wakil Kepala Seksi Kurikulum, Wakil Kepala Seksi Kesiswaan, Unit Pelayanan Inklusi, Unit Pelayanan Perpustakaan, Tata Usaha Akademik, Unit Pelayanan Kesehatan Sekolah, Staf Pengajar yang terdiri atas 6 guru tetap dan 1 guru tamu.

Pelaku

- Pemerintah Desa dan Lintas Sektor
- Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan masa depan anak-anaknya serta anak-anak.

Program

1. Pembinaan Akhlak
2. Pemantapan Ilmu Pengetahuan
3. Pembelajaran tentang kepemimpinan
4. Life Skill

Pendanaan

Sukarela

Hasil

1. Siswa-siswi yang ikut serta berjumlah 138 orang: 67 orang anak Kelas 1-3 SD, dan 71 orang Kelas 4-6 SD, laki-laki sebanyak 60 orang dan perempuan 78 orang
2. Kemandirian anak-anak sudah mulai terlihat
3. Perilaku sehari-hari mulai berubah menjadi lebih sopan
4. Anak-anak mulai peduli terhadap lingkungan seperti menjaga kebersihan dengan memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori tembok
5. Anak-anak mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum dan setelah makan atau memegang benda kotor, membuang sampah pada tempatnya, mandi sehari 2 kali, dan banyak lagi

Pembelajaran

1. Memulai sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan anak-anak, tidak mutlak harus diawali dengan dana atau biaya tinggi
2. Dengan metode berpetualang di alam bebas, anak dapat menerapkan proses belajar mengajar secara keseluruhan dan dapat menciptakan suatu perkembangan bakat secara fisik dengan menggabungkan nilai emosi pada dirinya dan kerja kelompok bersama teman-temannya
3. Dengan metode belajar di alam bebas, akan dapat membentuk Keteladanan, membentuk perilaku manusia melalui pengenalan terhadap ciptaan Allah SWT, dan penghargaan lingkungan selain dirinya.
4. Membiasakan anak berpikir secara logis dan mendorong rasa ingin tahu. Dengan melihat gejala alam yang tengah berlangsung.

Rekomendasi

Perlu sosialisasi lebih intensif untuk mendapat dukungan masyarakat, terutama agar para orangtua dapat mendorong anak-anak memanfaatkan waktu diluar jam sekolah dengan lebih baik, lebih dekat dan dapat mengenali lingkungan dan alam sekitar, sopan, dan mandiri.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Munawir Haris

Jabatan : Kepala Desa Rensing Raya

Kontak : 081918489030

PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK PAUD DENGAN SURAT HIBAH

Inovator

Pemerintah Desa Barabali

Lokasi

Desa Barabali, Kecamatan Batukliang,
Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Desa Barabali, Batukliang, Lombok Tengah, memprioritaskan pengalokasikan dana desa bagi pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi dusun yang dapat menunjukkan surat hibah tanah. Hasilnya, desa mendapat jaminan akan keberlanjutan fungsi PAUD dan terhindar dari konflik dengan ahli waris pemilik tanah di kemudian hari.

Latar Belakang

1. Desa Barabali adalah desa terluas di Kecamatan Batukliang dan wilayahnya dibagi menjadi 23 dusun dimana mata pencaharian sebagian besar warganya adalah petani
2. Tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar menjadi semakin sulit dengan semakin padatnya penduduk
3. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan otonomi yang seluasnya kepada desa untuk membangun sendiri desanya di bidang infrastruktur maupun pembangunan manusianya agar menjadi desa mandiri dan Barabali mengalokasikan 30% APBDesa untuk pembangunan bidang pelayanan sosial dasar
4. Banyaknya anak usia balita di desa dan animo masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan diikuti dengan banyaknya usulan pembangunan PAUD dari dusun-dusun

Upaya

Pengalokasian Dana Desa untuk pendirian PAUD bagi dusun yang dapat menunjukkan surat hibah tanah

Manfaat

- 1) Menghindari pemilik lahan hibah menggunakan lahannya untuk kebutuhan pribadi di kemudian hari
- 2) Terbangun rasa kepemilikan yang kuat terhadap gedung PAUD di desa
- 3) Membangun kapasitas desa dengan pendidikan agar menjadi desa yang mandiri

Proses

1. Pihak desa memulai sosialisasi dan fasilitasi masyarakat atas kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama pada ketentuan penyediaan/pembahasan lahan swadaya yang selama ini menjadi permasalahan
2. Pihak desa memperjelas kebijakannya melalui sosialisasi pada saat mengunjungi dusun-dusun
3. Dilakukan pertemuan tingkat desa dalam penetapan prioritas kegiatan terkait beberapa kegiatan yang berupa pembangunan fisik yang harus divalidasi pengadaan hibah lahannya dengan membuat perjanjian hitam diatas putih dengan tanda tangan ahli waris sah tanah tersebut

4. Musyawarah penetapan Draft Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) terkait kegiatan yang disepakati untuk didanai oleh Dana Desa dan melalui Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) yang sudah memenuhi persyaratan
5. Setelah RKP Desa ditetapkan, tim penyusun menganalisa kegiatan yang akan dilakukan dengan alokasi anggaran dalam perhitungan volume, satuan harga, dan hal lainnya yang dijabarkan dalam RAPBDes dan disetujui melalui musyawarah tingkat desa penetapan APBDes tahun mendatang
6. Dibuat Peraturan Desa (Perdes) untuk memperkuat legalitas seluruh proses hingga ditetapkannya APBDes tersebut
7. Dibatasi jumlah pembangunan PAUD per tahunnya hanya dua unit gedung
8. Dusun yang ingin mendapatkan paket bantuan pembangunan gedung PAUD diminta menyiapkan tanah yang akan dihibahkan dan membuat surat hibah atas tanah tersebut dari pemilik kepada pihak Desa
9. Gedung PAUD yang dibangun desain dan besarnya sama berukuran 7 x 7 meter persegi, dengan anggaran Rp 60 juta di luar harga lahan.

Hasil

1. Telah dibangun empat gedung PAUD di empat dusun di Desa Barabali
- 2) Fungsi gedung PAUD diintegrasikan dengan kegiatan Posyandu, BKD, pelayanan administrasi dusun, balai sangkep desa, dan TPQ

Rekomendasi

Dalam melakukan hibah lahan dari masyarakat hendaknya dibuat tertulis hitam di atas putih agar terhindar kesalahan penggunaan lahan dan konflik atau gugatan dari ahli waris pemilik lahan.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hidayatul F

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Kontak : 0818367117

PROGRAM JAMKESDES DAN BAPAK ANGKAT KESEHATAN

Inovator

Pemerintah Desa Pongenjek

Lokasi

Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Desa Pongenjek, Jonggat, Lombok Tengah, sejak 2010 membuat program Jaminan Kesehatan Desa (Jamkesdes) bagi masyarakat yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pada 2017, Pemerintah Desa Pongenjek menggulirkan program uji coba Bapak Angkat Kesehatan untuk menggantikan Jamkesdes yang berakhir 2016. Hasilnya, warga desa yang kurang mampu masih bisa mendapatkan layanan perawatan kesehatan.

Latar Belakang

1. Pada 2010, masih banyak warga desa Pongenjek yang belum memperoleh Jamkesmas, jumlahnya lebih dari separuh warga
2. Sering terjadi keterlambatan dalam penanganan penyakit yang menyebabkan kematian terhadap ibu, anak, maupun penderita sakit lainnya karena alasan tidak mampu
3. Karena alasan biaya pula, jarang warga yang melakukan pemeriksaan dini terhadap penyakit yang dideritanya
4. Perlu ada jalan keluar yang untuk mengurangi beban warga dan mendorong warga sekaligus memberi pengarahan akan pentingnya pemeriksaan dini terhadap penyakit

Upaya

Membuat program Jamkesdes mulai 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan program Bapak Angkat Kesehatan sebagai upaya uji coba pada 2017.

Manfaat

Masyarakat miskin bisa memperoleh layanan kesehatan

Proses

1. Bermula dari keluhan warga yang merasa telah terjadi kesenjangan pelayanan kesehatan, dimana warga yang memperoleh Jamkesmas dan Jamkesda, namun adapula yang tidak
2. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Dusun dan kemudian BPD
3. Dilakukan pembicaraan di desa terkait keluhan tersebut
4. Tercapat kesepakatan akan perlunya menganggarkan ADD untuk mengatasi permasalahan dalam kesenjangan pemberian layanan kesehatan dan mengatasi permasalahan pemeriksaan dini atau Jamkesdes
5. Pemerintah Desa membicarakan hal tersebut dengan pihak Puskesmas Bonjeruk untuk bekerjasama dalam program Jamkesdes tersebut

6. Pemerintah Desa menyepakati mekanisme pemberian Jamkesdes, dimana:
 - a. Desa akan menanggung separuh biaya perawatan opname warga desa Pengejek di Puskesmas Bonjeruk
 - b. Puskesmas menagihkan biaya tanggungan penderita tersebut ke pihak pemerintah desa setiap bulan
7. Pihak Pemerintah Desa kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi terkait biaya perawatan opname bagi warganya
8. Seiring munculnya Surat dari Kemendagri No. 412.2/9183/BPD per 28 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut Rakernis Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Edaran Bupati Lombok Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Desa per April 2016, dana desa tidak diperbolehkan bagi pemberian bantuan tunai kepada perorangan/individu melainkan harus melalui lembaga, maka program Jamkesdes dihentikan
9. Pemerintah Desa berdiskusi mencari solusi untuk membantu warga tetap mendapatkan layanan kesehatan, sehingga tercetus gagasan Bapak Angkat Kesehatan mulai 2017
10. Bapak Angkat Kesehatan ini adalah upaya untuk mengajak warga desa yang mampu untuk memberikan subsidi pengobatan kepada warga miskin yang sakit, yang sifatnya sukarela dan insidental jika ada warga miskin yang sakit
11. Hingga saat ini, terdapat 10 warga yang bersedia menjadi Bapak Angkat Kesehatan di desa Pengejek

Pelaku

Kepala Desa Pengejek, Puskesmas Bonjeruk, BPD dan para Kepala Dusun di desa Pengejek

Pendanaan

- Jamkesdes berasal dari ADD 2010-2016
- Bapak Angkat Kesehatan berasal dari kocek pribadi Bapak Angkat 2017

Hasil

- 1) Angka kematian ibu dan anak berkurang
- 2) Masyarakat termotivasi untuk melakukan pemeriksaan dini terhadap penyakit
- 3) Warga miskin masih dapat menikmati layanan kesehatan

Rekomendasi

Perlu dicari solusi untuk melanjutkan program subsidi biaya kesehatan bagi warga desa tidak mampu yang belum memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Irawan Susiandi

Jabatan : Kepala Desa Pengejek

Kontak : 081803762491

REVITALISASI PAUD

Inovator

Guru PAUD Bintang Hati, Dusun Kabar, Desa Taratak

Lokasi

Desa Taratak, Batukliang Utara,
Lombok Tengah

Guru PAUD berupaya mencari tempat yang dapat ditumpangi untuk melanjutkan kegiatan belajar-mengajar 50 anak peserta didiknya. Akhirnya mereka menemukan tempat potensial untuk ditumpangi, yakni Posyandu Melati XI di dusun tetangga, di Dusun Kabar. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dusun Kabar dan kader-kader Posyandu disana, kegiatan belajar mengajar pun dapat dilanjutkan beberapa bulan kemudian.

Kini, anak-anak disana mendapat pendidikan usia dini, PAUD nya berkembang serta diminati oleh warga desa tetangga, kegiatan di gedung Posyandu pun menjadi lebih beragam, sehingga menguntungkan banyak pihak: anak-anak, orangtua murid, guru PAUD, kader Posyandu, bahkan dusun dan desa.

Latar Belakang

1. PAUD beroperasi sejak 2007 namun terancam bubar pada 2013 karena program bantuan pada PAUD tersebut dihentikan dan sejumlah pengurus pun hengkang
2. PAUD meninggalkan tiga orang guru dan 50 anak-anak murid PAUD tersebut
3. PAUD tidak memiliki biaya operasional
4. PAUD tidak memiliki gedung

Upaya

Revitalisasi PAUD dengan berjuang mencari tempat untuk menampung peserta didik dan meleburkan diri bersama Posyandu yang bersedia menampungnya

Manfaat

- Kegiatan PAUD dapat berlanjut sehingga pendidikan anak usia dini terjamin
- Kegiatan di gedung Posyandu Melati XI menjadi semakin beragam dengan adanya kegiatan PAUD dan kegiatan lainnya
- Orangtua dan guru lebih tenang dan berkesempatan mendapat pelatihan di bidang kesehatan yang dikelola kader-kader Posyandu

Proses

- 1) Guru PAUD yang tersisa berdiskusi hingga pada keputusan: 1) harus menginformasikan kondisi kepada orangtua peserta didik; dan 2) mencari tempat lain untuk menampung kegiatan belajar-mengajar PAUD mereka
- 2) Guru PAUD bahu-membahu mencari tempat yang berpotensi dapat menjadi tempat belajar mengajar PAUD, mulai dari dusun mereka bahkan ke desa tetangga
- 3) Guru PAUD menemukan Posyandu Melati XI di dusun Kabar yang kala itu hanya dimanfaatkan sebulan sekali untuk kegiatan Posyandu

- 4) Guru PAUD mendatangi Kepala Dusun untuk menceritakan masalah mereka dan meminta ijin menggunakan gedung Posyandu Melati XI untuk kegiatan PAUD
- 5) Kepala Dusun memperbolehkan dengan satu syarat agar guru PAUD berkoordinasi dan bekerjasama dengan kader-kader Posyandu
- 6) Guru PAUD kemudian mencari tahu keberadaan kader-kader Posyandu dan mendatangi koordinator kadernya
- 7) Koordinator Posyandu menyarankan guru-guru PAUD untuk datang pada hari Posyandu guna berdiskusi dengan kader-kader Posyandu lainnya
- 8) Pada pertemuan di hari Posyandu, kader-kader Posyandu menyambut baik permintaan guru PAUD untuk menggunakan gedung Posyandu sebagai tempat belajar-mengajar anak-anak
- 9) Guru PAUD segera menginformasikan kabar gembira ini kepada orangtua sasaran didik dan melayangkan surat ajakan musyawarah kepada orangtua peserta didik
- 10) Pada musyawarah guru PAUD dengan orangtua peserta didik dan kader Posyandu, mereka menyepakati untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar PAUD pada Agustus 2013 dan terintegrasi dengan Posyandu. PAUD tersebut kini berganti nama menjadi PAUD Bintang Hati.

Pelaku

Guru PAUD Bintang Hati, Kepala Dusun, Kader Posyandu Melati XI

Pendanaan

- Upaya Revitalisasi PAUD tidak memerlukan biaya
- Operasional PAUD diperoleh dari iuran yang ditetapkan dan disetujui bersama orangtua murid
- PAUD dan Posyandu mendapat dukungan dari Dana Desa

Pembelajaran

- 1) Jika memiliki masalah serupa, komite pendidik harus segera menginformasikan dan bermusyawarah dengan orangtua peserta didik
- 2) Jika menemui jalan buntu, para pendidik jangan panik dan putus asa, namun ada baiknya berkoordinasi dengan Kepala Dusun atau Kepala Desa untuk mendapat arahan dan dukungan bagi keberlanjutan PAUD

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hidayatul F

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Kontak : 0818367117

MENGGAET INVESTASI UNTUK PELAYANAN INKLUSI

Inovator

Pemerintah Kecamatan Montong Gading

Lokasi

Kecamatan Montong Gading,
Lombok Timur

Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, menyelenggarakan Gebyar Festival Generasi Sehat Cerdas (GSC) untuk mempromosikan kegiatan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sekaligus menggaet minat para pihak untuk lebih peduli pada keberlanjutan pelayanan pendidikan bagi ABK.

Latar Belakang

- 1) Terdapat sejumlah ABK di kecamatan, pada 2010 teridentifikasi sebanyak 26 anak
- 2) Pelayanan untuk ABK selama ini difasilitasi oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari program GSC yang berakhir 2016 berupa beasiswa dan transportasi (ojek) ke sekolah
- 3) Perlu upaya melanjutkan pelayanan pendidikan bagi ABK setelah BLM dari GSC berakhir

Upaya

Menggelar Gebyar Festival GSC 2016

Manfaat

- Mempromosikan kegiatan pelayanan bagi ABK di Montong Gading
- Menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pelayanan bagi ABK
- Menumbuhkan kepedulian para pihak untuk turut berkontribusi dalam keberlanjutan pelayanan bagi ABK

Proses

- 1) Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
- 2) Mengundang pihak terkait (UPTD Pendidikan) untuk sosialisasi di Kantor Camat
- 3) Mengundang para pihak untuk menentukan kepanitiaan dan konsep acara, bertempat di Kantor Camat
 - a. Kepanitiaan: Kepanitiaan terbagi atas, Seksi Acara, Seksi Umum, Seksi Promosi, Seksi Acara. Bertindak selaku Ketua Panitia adalah Sekretaris Camat.
 - b. Konsep acara: acara satu hari penuh, digelar di alam terbuka agar dapat dinikmati dan dihadiri sebanyak-banyaknya masyarakat; disediakan stand pameran bagi setiap desa untuk mempromosikan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana ke depan; menghadirkan ABK berprestasi; menggelar lomba-lomba untuk anak seperti lomba mewarnai, memasak (bagi orangtua dan kader desa), serta hiburan. Lomba mewarnai diikuti oleh 100 anak, lomba memasak diikuti oleh 6 desa
 - c. Waktu/tempat: acara digelar Oktober 2016/ di salah satu tempat wisata di Montong Gading
 - d. Susunan acara: Pembukaan, Lomba-lomba dan meninjau stand pameran

- 4) Mengundang sponsor untuk mendukung acara: Telkomsel, BNI, Yamaha, Navaza dan Restu Komputer
- 5) Penentuan undangan dan distribusi undangan oleh Panitia: Penggerak PKK Kabupaten; BPMPD Kabupaten; Kapolsek; Babinsa; tokoh masyarakat; pimpinan BNI dan sponsor lain; kader Posyandu se-kecamatan; PKK se-kecamatan; penyedia layanan pendidikan, kesehatan; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kader Desa; TPMD; pelaksana kegiatan; sasaran dan penerima manfaat, PAUD se-kecamatan
- 6) Rapat-rapat persiapan dan kemajuan persiapan
- 7) Penyiapan tempat acara
- 8) Gladi resik
- 9) Pelaksanaan

Pelaku

Staf Kecamatan, pelaku GSC tingkat Kecamatan dan Desa, UPTD Pendidikan, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Pendanaan

- DOK *Capacity Building* dari program GSC
- Swadaya masyarakat
- Sponsor: penyediaan baju panitia, umbul-umbul, pialam air minum, tanda pengenal, dan biaya distribusi

Hasil

- Masuknya sejumlah kegiatan pelayanan ABK khususnya, dan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada umumnya, dalam RKP 2017 di semua desa meskipun saat itu belum diterbitkan Peraturan Daerah. Dan khusus desa Pringgo Jurang dan Pringgo Jurang Utara mengalokasikan dana untuk keberlanjutan pelayanan bagi ABK.
- Dukungan pendanaan (beasiswa) dari SDLB
- Tumbuhnya keperdualian dari para supir ojek yang mengantar ABK ke sekolah, termasuk membentuk kelompok ojek untuk ABK
- Tumbuhnya inisiatif baru bagi keberlanjutan kegiatan PSD dan pelayanan ABK

Rekomendasi

- Diperlukan komitmen waktu dan pemikiran para pihak dalam proses perencanaan dan persiapan Festival
- Perlu komitmen tindak lanjut dari para pihak untuk merealisasikan inisiatif baru yang terlahir dari Festival
- Perlu komitmen para pihak untuk melanjutkan inisiatif promosi serta upaya menggaet investasi bagi keberlanjutan pelayanan ABK khususnya dan kegiatan PSD pada umumnya.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Suhandi

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Timur

Kontak : 081933123010

FORUM KESEHATAN

DESA SIAGA

Inovator

Pemuda - Pemuda Desa Mapin Rea

Lokasi

Desa Mapin Rea, Alas Barat, Sumbawa

Pemuda-pemudi warga desa Mapin Rea, Alas Barat, Sumbawa, nerinisiatif membentuk Forum Kesehatan Desa Siaga pada 2015 guna mengawal kondisi kesehatan lingkungan dan warganya. Keberadaan forum yang dilegalkan oleh Keputusan Kepala Desa ini telah meningkatkan derajat kesehatan warga desa Mapin Rea dan mendorong kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran dan pembangunan desa.

Latar Belakang

- 1) Desa Mapin Rea memiliki wilayah administratif cukup luas dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan topografi perbukitan
- 2) Terdapat beberapa masalah sanitasi dan kesehatan, seperti drainase kurang baik sehingga menjadi sarang nyamuk demam berdarah di musim kemarau, TBC dan infeksi saluran pernapasan (ISPA)
- 3) Masih minimnya sarana prasarana kesehatan, hanya memiliki lima unit Posyandu dan sebuah Polindes
- 4) Di beberapa dusun masih ditemukan anak kurang gizi dengan berat badan di bawah garis merah (BGM)

Upaya

Membentuk Forum Kesehatan Desa Siaga pada 2015, yang fokus pada peningkatan kondisi kesehatan warga dan lingkungan. Forum ini dikukuhkan oleh Keputusan Kepala Desa pada April 2016.

Manfaat

- 1) Masyarakat mendapat "warning" atas perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terjadi sehingga dapat melakukan pencegahan dini atau antisipasi
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemuda-pemudi akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan dengan melakukan kerja bakti secara rutin
- 3) Dari angka kelahiran bayi sebesar 36 bayi per tahun, diketahui angka kematian bayi, angka kematian ibu saat melahirkan dan angka kematian anak relatif menurun, bahkan mencapai NOL persen
- 4) Memudahkan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan atau mengakses layanan kesehatan
- 5) Mendorong kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran dan pembangunan desa

Proses

- 1) Berawal dari kepedulian dan keprihatinan anggota Karang Taruna di desa, dilakukan diskusi hingga tercetus ide membentuk Forum Komunikasi Desa Siaga
- 2) Mengundang para pihak, termasuk tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Desa, dan warga desa yang peduli pada kesehatan lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat untuk menginformasikan ide pembentukan forum komunikasi tersebut dan mendapat persetujuan dari forum
- 3) Pembentukan struktur kepengurusan forum komunikasi
- 4) Penguatan forum oleh Keputusan Kepala Desa
- 5) Pengurus forum bermusyawarah membuat rencana kerja, termasuk rencana pendanaan serta upaya penggalangan dana dan pengelolaannya, dan pembagian peran sesuai rencana kerja
- 6) Pembukuan dan pelaporan kepada masyarakat dalam musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban

Program Kerja

- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan, seperti:
 - a. Sunatan, termasuk sunatan massal
 - b. Pengecekan kondisi kesehatan warga
 - c. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - d. Donor darah
 - e. Senam lansia
- 2) Kegiatan Ante Natal Care (ANC) untuk antar-jemput Ibu Hamil atau melahirkan ke pusat kesehatan
- 3) Kegiatan tanggap darurat lain, seperti kebakaran rumah, banjir, kecelakaan kerja

Pelaku

- Struktur organisasi Forum yang terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta Seksi-Seksi (Hubungan Masyarakat, Gizi, Kejadian Luar Biasa/KLB, Pelayanan Sosial Dasar/PSD, Pola Hidup Bersih dan Sehat/PHBS) dan para anggota
- Anggota terdiri atas pemuda-pemudi kreatif Karang Taruna, tokoh masyarakat serta unsur Pemerintah Desa
- Masyarakat desa

Pendanaan

- Swadaya masyarakat, seluruh masyarakat memberikan kontribusi berupa iuran per bulan yang dananya dikelola oleh Bendahara
- Bantuan pihak ketiga (donatur)
- Penggalangan dana dilakukan dengan cara iuran warga Rp 2.000 per bulan per kepala keluarga

Upah

Semua kegiatan dilakukan atas dasar sukarela dengan berpegang pada azas "Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat"

Hasil

- 1) Telah memfasilitasi khitanan untuk 22 orang anak
- 2) Memfasilitasi antar-jemput dan pemberian santunan bagi lebih dari 100 warga yang sakit dan harus dirujuk ke Puskesmas di ibukota kecamatan atau ke Rumah Sakit
- 3) Lebih dari 100 warga telah difasilitasi pengecekan kondisi kesehatannya
- 4) Melakukan kegiatan donor darah rutin setiap 3 bulan yang melibatkan hingga 50 warga sebagai pendonor
- 5) Memfasilitasi antar-jemput ke pusat kesehatan lebih dari 35 ibu hamil atau melahirkan

Rekomendasi

- Memerlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan Pemerintah Desa untuk mendapat dukungan
- Karena pengelolaan forum ini bersifat volunteer maka perlu mencari dan menempatkan pemuda-pemudi yang kreatif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk duduk dalam kepengurusan forum.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hasta

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Sumbawa

Kontak : 082145167739

KOMITMEN BERSAMA KEPALA DESA MENGUSUNG KEGIATAN PSD

Inovator

Pemerintah Kecamatan Lopok

Lokasi

Kecamatan Lopok, Sumbawa

Seluruh Kepala Desa di kecamatan Lopok, Sumbawa, menandatangani komitmen bersama yang menyatakan bahwa setiap desa akan melanjutkan dan mendanai kegiatan-kegiatan bidang pelayanan sosial dasar (PSD) pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya didanai oleh program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).

Latar Belakang

1. Sejak 2010, desa-desa di kecamatan Lopok mendapat dukungan program Generasi Sehat dan Cerdas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, diantaranya pelayanan Posyandu, termasuk pemeriksaan bayi dan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan (PMT)
2. Mulai 2017, dukungan program dibatasi pada peningkatan kapasitas kader dan masyarakat, tidak pada pembiayaan kegiatan pelayanan sosial dasar, padahal masyarakat telah merasakan manfaatnya

Upaya

Penandatanganan komitmen bersama kepala desa se-kecamatan dalam mengusung kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan di desa masing-masing, pada Oktober 2016.

Manfaat

- Menjamin keberlanjutan pelayanan sosial dasar kesehatan bagi ibu dan balita
- Menjaga kondisi kesehatan ibu dan balita
- Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan untuk mendukung kegiatan Posyandu karena pencairan dana baru bisa dilakukan pada bulan April, sehingga kader dan masyarakat melakukan iuran sesuai kemampuan (jimpitan)

Proses

- Penandatanganan komitmen bersama Kepala Desa se-kecamatan Lopok, Sumbawa, merupakan bagian dari agenda Wokshop program Generasi Sehat dan Cerdas yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2016
- Penandatanganan tersebut merupakan wujud komitmen dari setiap Kepala Desa tanpa melalui paksaan

Pelaku

- 1) Fasilitator program
- 2) Kepala Desa
- 3) Pemerintah Kecamatan

Pendanaan

- Penandatanganan komitmen: NOL pendanaan
- Kegiatan pelayanan sosial dasar kesehatan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil

- Mulai Januari 2017, seluruh proses kegiatan keposyanduan sudah diserahkan kepada setiap desa melalui penganggaran Dana Desa
- Seluruh desa telah memasukan pendanaan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) Posyandu dan insentif kader Posyandu kedalam anggaran belanja desa

Rekomendasi

Penggalangan komitmen Kepala Desa untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pelayanan sosial dasar kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penandatanganan komitmen yang menjadi salah satu agenda workshop

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Hasta

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Sumbawa

Kontak : 082145167739

OPTIMALISASI ASET DESA MENUJU KEMANDIRIAN POSYANDU

Inovator

Pemerintah Desa Goa

Lokasi

Desa Goa, Jereweh, Sumbawa Barat

Pemerintah Desa Goa, Jereweh, Sumbawa Barat, melakukan optimalisasi aset desa berupa tanah yang belum tergarap (lahan tidur) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi Kebun Gizi. Kebun tersebut dikelola oleh kader Posyandu bekerjasama dengan PKK, Karang Taruna, serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Dinas Peternakan setempat.

Upaya tersebut telah memudahkan masyarakat memperoleh bahan makanan bagi keluarga dan pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu. Selain itu, penjualan sebagian hasil panen kebun gizi tersebut menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan Posyandu.

Latar Belakang

- 1) Pada 2016, tujuh bayi-balita di desa tersebut dinyatakan kurang gizi
- 2) Penanganan kasus gizi kurang selama ini difasilitasi program Generasi Sehat dan Cerdas, sehingga timbul kekhawatiran akan muncul kasus serupa karena program sudah tidak mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat mulai 2017
- 3) Rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi sumber gizi utama seperti sayuran, daging, dan ikan
- 4) Terdapat potensi aset berupa tanah Pemerintahan Desa yang belum digarap atau dimanfaatkan
- 5) Terdapat potensi sumberdaya manusia, termasuk kader Posyandu yang kompak dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat

Upaya

Optimalisasi aset desa untuk kemandirian Posyandu dengan menyulap lahan tidur menjadi Kebun Gizi.

Manfaat

- 1) Mengubah lahan/tanah tidur menjadi lahan yang bermanfaat
- 2) Memudahkan masyarakat memperoleh bahan makanan yang dibutuhkan
- 3) Posyandu dapat menyediakan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi sasarannya
- 4) Rumah tangga yang memiliki pekarangan terpacu untuk menanaminya dengan sayuran dan bahan makanan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga

Proses Optimalisasi Aset Desa

1. Khusus untuk mendorong upaya peningkatan kesehatan, terutama penanganan bayi balita gizi kurang, Pemerintah Desa mengundang para pihak untuk berdiskusi mencari solusi untuk mengatasinya. Salah satu usulan yang muncul adalah pengadaan Kebun Gizi.

- 2) Pemerintah Desa mengidentifikasi aset desa, terutama berupa aset tetap atau tidak bergerak berupa lahan tidur
- 3) Kemudian disepakati penggunaan lahan tidur di dua dusun di desa tersebut untuk dikelola menjadi Kebun Gizi
- 4) Pada musyawarah berikutnya, Pemerintah Desa menyerahkan pengelolaan dua lahan tidur tersebut kepada Posyandu dan PKK. Alasan utama dipilihnya kader Posyandu guna mempermudah masyarakat memperoleh bahan makanan tambahan dari panen, terutama untuk digunakan sebagai PMT Posyandudan menjadi sumber pendanaan Posyandu untuk menjadi posyandu mandiri
- 5) Pemerintah Desa memanggil kader Posyandu dan anggota PKK, termasuk fasilitator desa yang bertugas untuk menyampaikan kesepakatan penyerahan lahan tidur desa untuk dikelola menjadi Kebun Gizi
- 6) Kader Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa melakukan diskusi lebih lanjut terkait konsep Kebun Gizi. Dalam musyawarah disepakati Kebun Gizi terdiri dari tiga bagian, yaitu kebun bibit yang berisi sayuran dan bibit, kolam ikan, dan ternak ayam

Proses Penggarapan Kebun Gizi

- 1) Kader Posyandu, PKK dan Pemerintahan Desa sepakat untuk menggunakan lahan tidur di dua dusun dijadikan Kebun Gizi yang dikelola bersama oleh kader Posyandu dan PKK.
- 2) Proses awal pengelolaan Kebun Gizi adalah pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Kebun Gizi. Selain kader Posyandu dan PKK, pengelolaan Kebun Gizi ini melibatkan Karang Taruna dan anggota masyarakat yang peduli akan kebutuhan gizi masyarakat
- 3) Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PPL Pertanian untuk kebun bibit dan sayuran, serta bekerjasama dengan Puskewan Dinas Peternakan untuk pengelolaan ternak
- 4) Setelah koordinasi dan konsultasi dengan PPL dan Puskewan, dilakukan identifikasi dan pemilihan komoditi tanaman yang akan dibiakkan di Kebun Gizi dan dibagikan ke masyarakat, serta ternak (ikan dan ayam) yang akan dipelihara
- 5) Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilihan komoditi, dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan bahan pembuatan kandang, pembukaan lahan, penggemburan, alat-alat pertanian dan peternakan, hingga pengadaan bibit sayuran dan ternak, yang disesuaikan dengan target sasaran rumahtangga dan Posyandu
- 6) Pengadaan bahan untuk pembuatan kandang, pembukaan lahan pertanian dan penyediaan kolam, serta pembangunannya oleh warga:
 - a. Pembuatan kandang ayam
 - b. Pembuatan kolam (dengan alas) terpal yang digunakan untuk memelihara ikan lele
 - c. Pembuatan bedengan untuk menanam sayuran.
 - d. Pembuatan kebun bibit yang didalamnya terdapat rumah bibit, kebun, dan kolam ikan lele. Proses pertama pembuatan kebun bibit adalah penyemprotan rumput liar agar kering sehingga mudah di olah. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rumah bibit sebagai tempat penyemaian benih
 - e. "Pembangunan" Kebun Gizi ini membutuhkan waktu tiga minggu sampai siap ditanami
- 7) Pengadaan komoditas. Misalkan pengadaan 100 ekor ayam kampung dengan umur rata-rata 2-3 bulan, bibit ikan lele, dan beberapa jenis sayuran seperti mentimun, pare, teruwuk, kacang panjang, dan lain-lain
- 8) Pengelolaan dan pemeliharaan, termasuk penyuluhan oleh PPL Pertanian dan Puskewan, penyiraman, penyiangan dan pemberian pupuk tanaman, serta pemberian pakan dan pemberian obat untuk ternak.

Pembagian Kerja

Pemeliharaan dilakukan secara bergilir di antara kader setiap hari dengan pembagian tugas: penyiraman, penyiangan, pemberian pupuk, pemberian pakan dan obat untuk ternak.

Pendanaan

Dana desa melalui dasawisma PKK

Hasil

Hasil panen pertama sayuran, ikan lele dan ayam, sepakat digunakan sepenuhnya untuk menambahkan modal, pembelian bibit ikan nila, makanan ikan, pakan ayam, serta bambu untuk perbaikan pagar dan sebagian untuk PMT.

Rekomendasi

- 1) Konsep kebun gizi harus didiskusikan dengan baik dan terkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kualitas sayuran dan ternak yang dibiakkan
- 2) Pengelolaan dan pemeliharaan kebun gizi memerlukan sumberdaya yang benar-benar memiliki jiwa sukarela tinggi dan keinginan untuk mendukung pemenuhan kualitas gizi keluarga dan sasaran Posyandu.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Benjamin

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat

Kontak : 087863787433

Bursa B

Bidang Infrastruktur
dan Kewirausahaan

DATANG. KOMIT. TIRU. MAJU

MEMANFAATKAN *SOLAR CELL* UNTUK **MENGAKSES AIR BERSIH**

Warga Kampung (apakah sama dengan Desa? Jika sama, plz pakai kata Desa) Biatan Baru, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memanfaatkan teknologi solar cell (sel surya) untuk mendapatkan air bersih. Listrik dari solar cell memiliki daya yang lebih kuat sehingga air bisa langsung mengalir ke rumah-rumah warga. Sejak itu, masalah air teratasi, tingkat kesehatan masyarakat pun semakin terjaga.

Latar Belakang

- Akses terhadap air bersih di Kampung Biatan Baru tergolong sulit. Warga harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke kampung tetangga untuk mendapatkan air
- Pada 1997, Biatan Baru mendapat bantuan mesin diesel untuk pompa air namun hanya menjangkau hingga ke bak penampungan
- Biaya pengoperasian mesin diesel cukup tinggi
- Banyak warga migrasi keluar kampung sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) menyusut dari 215 KK menjadi 165 KK (564 jiwa) pada 2017

Solusi

Pemerintah kampung memanfaatkan teknologi solar cell untuk mendapatkan air bersih.

Manfaat

- Masing-masing rumah warga menikmati air bersih langsung secara gratis
- Menghemat biaya operasional hingga 40 persen dibandingkan penggunaan mesin diesel
- Menghemat tenaga operasional karena hanya butuh 4 orang sedangkan dengan mesin diesel dibutuhkan 12 tenaga kerja
- Menghemat pengeluaran desa

Proses

- Pada Februari 2015, dalam agenda rutin tahunan untuk mengetahui aspirasi masyarakat, warga melalui Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKM) Kampung mengusulkan unit solar cell untuk mengalirkan air ke desa
- Usul dari BPK, LKM dan tokoh masyarakat tersebut diterima oleh pemerintah kampung dan dimasukkan ke dalam anggaran belanja desa
- Pemerintah kampung menerbitkan surat persetujuan pengadaan solar cell pada 30 Mei 2016
- Pemerintah kampung melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Kampung membuka lelang pengadaan solar cell. Susunan TPK Pembangunan Kampung terdiri atas:
 - a) Ketua
 - b) Wakil ketua
 - c) Bendahara
 - d) Anggota

- TPK Pembangunan Kampung bertugas untuk:
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan swakelola mulai dari perencanaan, pengawasan dan evaluasi
 - b) Membentuk tim swakelola (tim perencana, pelaksana, pengawas dan pelaporan)
 - c) Membuat laporan perkembangan pekerjaan swakelola kepada kepala kampung
 - d) Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala kampung.
 - e) Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan swakelola
- TPK Pembangunan Kampung membuat Tim Swakelola Pemelihara Solar Cell, yang susunannya terdiri dari:
 - a) Ketua dan pengelola air bersih
 - b) Wakil ketua dan pengelola air bersih
 - c) Anggota dan pengelola air bersih
 - d) Wakar mesin air bersih dan solar cell
- Pemerintah kampung menerbitkan surat keputusan untuk mengukuhkan TPK Pembangunan Kampung dan Tim Swakelola Pemelihara solar cell
- Pada November 2016 dilakukan lelang pengadaan solar cell dengan merek, model, dan kapasitas yang ditentukan. Lelang ini diikuti oleh CV Deal dan CV Sinergi Multi Karya
- Pemerintah kampung mengumumkan pemenang lelang adalah CV DEAL, kontraktor asal Tanjung Redeb, Berau. Salah satu klausul memuat ketentuan: garansi pengelolaan dan perawatan hingga 31 Desember 2017 sehingga warga gratis menggunakan air
- Pada bulan itu juga, kontraktor melakukan pembelian dan pemasangan alat yang ditempatkan sekitar 100 meter dari air. Kontraktor juga membangun fasilitas penunjang agar air bisa sampai ke rumah warga, yakni 3 unit penampung air, 1 unit mesin penghisap air, 1 unit pendorong air, pipa penyalur air, dan kabel penghubung aliran listrik

Pendanaan

- Pengadaan sel surya dan fasilitas pendukung berasal dari dana kampung:
 - a) Bahan pipanisasi : Rp 33,6 juta
 - b) Alat solar cell : Rp 313,3 juta
 - c) Upah pekerja : Rp 23,3 juta
 - d) Papan nama kegiatan : Rp 150 ribu
 - e) Honor TPK : Rp 11,2 juta
- Operasional: Swakelola

Pelaku

- Pemerintah kampung
- Masyarakat (tim pemelihara)
- Pihak ketiga (kontraktor pemenang lelang)

Hasil

- Awal 2017 sel surya sudah beroperasi masing-masing 1.200 watt dan 4000 watt. Keduanya mampu menghidupkan dua mesin pompa air dengan debit head 70 meter dan kapasitas 80 meter kubik/detik
- Kebutuhan air bersih warga terjamin, terutama untuk minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Bahkan warga dapat menggunakan air bersih secara gratis hingga masa garansi berakhir
- Tingkat kesehatan masyarakat relatif terjaga. Sebelumnya, akibat kekurangan air segelintir warga mengalami sakit perut namun kebanyakan warga hanya mengeluhkan jauhnya jarak mengambil air

Pembelajaran

- Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan patut dicoba untuk mengatasi persoalan air. Solar cell menjadi solusi karena Indonesia dilimpahi sumber energi sinar matahari
- Teknologi solar cell bisa dimanfaatkan oleh daerah yang mendapat limpahan sinar matahari dan memiliki sumber mata air
- Penentuan lokasi solar cell yang tepat mempengaruhi kapasitas daya listrik dan kapasitas air yang dihasilkan

Rekomendasi

- Perlu dipikirkan penempatan solar cell yang tepat dan prasarana/akses untuk menjangkanya (seperti jembatan)
- Perlu dipikirkan pengelola solar cell ketika masa jaminan perawatan dari kontraktor habis, termasuk besaran iuran per warga setelah masa garansi berakhir

Kontak Informasi

Robin, Kepala Kampung Biatan Baru
HP : 085246299135

M. Subagyo, Kepala Badan Perwakilan Kampung Biatan Baru
HP : 082353487596

Alamat Kantor Kampung:
Jalan Sukun RT 1, Kampung Biatan Baru, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

PEMANFAATAN TENAGA PROFESIONAL

UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DESA

Pemerintah Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berinisiatif untuk bermitra dengan tenaga profesional dalam mengembangkan potensi sejumlah usaha produktif desa dengan membentuk petugas sementara pengelola dan pengurus kegiatan usaha-usaha tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjembatani dan meningkatkan kapasitas bagi BUMDes agar lebih siap mengelola usaha-usaha tersebut, mendatangkan pendapatan bagi desa, sekaligus memenuhi kebutuhan warga.

Latar Belakang

- Desa Pagarawan dengan penduduk lebih dari 3.900 jiwa memiliki sejumlah potensi usaha produktif, diantaranya budidaya ikan air tawar dan budidaya jamur tiram
- Pemerintah Desa memiliki rencana untuk mengembangkan potensi usaha produktif tersebut, ditambah dengan usaha penyewaan alat bor karena banyak peminatnya
- Usaha-usaha produktif tersebut sedianya akan dikelola oleh BUMDes, namun BUMDes belum memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut

Solusi

Pemerintah desa bermitra dengan tenaga profesional dalam mengembangkan potensi usaha desa

Manfaat

- Desa dapat mengembangkan usaha secara profesional
- Desa memiliki produk unggulan dan memperoleh penghasilan
- BUMDes dapat belajar pengelolaan dan pengembangan usaha produktif kepada tenaga yang lebih profesional

Proses

- Pemerintah Desa menjangring usulan-usulan warga di bidang usaha produksi melalui berbagai cara, diantaranya:
 - o Menyerap aspirasi masyarakat saat Kepala Desa “blusukan” ke dusun-dusun
 - o Musyawarah-musyawarah dusun
 - o Menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan potensi desa
 - o Melakukan analisa usaha produktif yang melibatkan para Kepala Dusun dan ketua RT/RW
- Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdapat usulan masyarakat yang mencuat, yakni agar Pemerintah Desa dapat mengembangkan tiga usaha produktif yakni usaha pengadaan alat bor, budidaya ikan air tawar dan jamur tiram
- Pemerintah Desa kemudian menggelar Musyawarah Desa untuk melimpahkan pengelolaan usaha-usaha produktif tersebut, termasuk kepada BUMDes hingga muncul wacana untuk mencari tenaga profesional untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha tersebut
- Kesiapan BUMDes untuk mengelola usaha-usaha atau salah satu usaha tersebut, dikonfirmasi melalui banyak kesempatan, baik dalam pembicaraan nonformal dengan Direktur BUMDes maupun melalui Musyawarah Desa

- Dalam Musyawarah Desa selanjutnya, Pemerintah Desa memutuskan pengelolaan usaha-usaha produktif tersebut akan diserahkan kepada tenaga profesional dari masyarakat dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
- Pemerintah Desa dan BUMDes kemudian berdiskusi membuat mekanisme pemilihan tenaga profesional dimaksud:
 - a) Menjalin komunikasi dengan masyarakat, Kepala Dusun dan Ketua RT
 - b) Pemetaan tokoh yang mempunyai keahlian di bidangnya. Alat bor misalnya, ada 5-6 orang yang berprofesi sebagai tukang bor
 - c) Petugas pengelola dipilih berdasarkan kemampuan terbaik yang terbaca di masyarakat
 - d) Tidak ada jangka waktu masa tugas pengelola
- Pemerintah Desa juga meminta bakal calon pengelola untuk membuat rencana kerja pengelolaan dan pengembangan usaha yang akan dijalankan
- Pemerintah Desa kemudian melakukan penunjukan petugas pengelola dan pengurus yang dikukuhkan dalam:
 - a) SK Kepala Desa Pagarawan Nomor 188.45/49/2006/2016 untuk tata kelola jamur tiram.
 - b) SK Kepala Desa Pagarawan Nomor 188.45/50/2006/2016 untuk usaha penyewaan alat bor.
 - c) SK Kepala Desa Pagarawan Nomor 188.45/61/2006/2016 untuk budidaya ikan air tawar.
- Dalam SK tersebut memuat poin-poin kesepakatan dan sanksi, termasuk penerapan sistem bagi hasil antara Pemerintah Desa dengan pengelola:
 - a) Penyewaan alat bor 75 persen (pengelola) dan 25 persen (desa)
 - b) Budidaya jamur tiram 20 persen (pengelola) dan 80 persen (desa)
 - c) Budaya ikan air tawar 20 persen (pengelola) dan 80 (desa)
- Pemerintah Desa mengalokasikan dana penyertaan modal awal untuk ketiga usaha tersebut
- Pemerintah Desa melakukan pengawasan dan monitoring dengan cara:
 - a) Meminta laporan keuangan per enam bulan
 - a) Perkembangan usaha disampaikan dan didiskusikan dalam Musyawarah Desa

Pendanaan

Dana Desa

Pelaku

- Pemerintah Desa
- Warga desa
- Kelompok masyarakat (Gapoktan)

Hasil

- Desa menerima pendapatan signifikan dari usaha yang dikembangkan. Usaha jamur tiram memberi pemasukan Rp 8,7 juta dalam jangka waktu enam bulan
- Warga mendapatkan alat bor dengan biaya sewa lebih murah dari harga pasar
- BUMDes dapat belajar secara langsung perihal pengelolaan dan pengembangan usaha produktif dari tenaga profesional

Pembelajaran

- Analisa usaha dan pemilihan pengelola usaha produktif dengan menyerap aspirasi dan melibatkan masyarakat dapat memberikan hasil lebih baik, karena sejumlah warga masyarakat juga berkecimpung dalam usaha produktif
- Warga desa dan kelompok masyarakat bisa diajak bermitra untuk melakukan pengembangan usaha desa
- Peluang usaha yang mendatangkan pemasukan dan manfaat bagi desa dan masyarakat dapat terealisasi dengan memanfaatkan tenaga profesional dari masyarakat sendiri
- Pengawasan dan monitoring yang baik dapat menjaga hasil produksi

Rekomendasi

- Perlu ada periode waktu untuk menentukan kapan pengelolaan usaha tersebut dapat diserahkan kepada BUMDes
- Perlu lebih dalam melibatkan BUMDes dalam pengelolaan dan pengembangan usaha tersebut agar peran tersebut benar-benar dipegang BUMDes selaku pengelola usaha desa

Kontak Informasi

Ahmad Zainudin, Kepala Desa Pagarawan
HP: 085266212515

Soemarjon, Direktur BUMDes Pagarawan
HP: 08127823064

Alamat Kantor Desa Pagarawan:
RT 03, Dusun II, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka

KONSERVASI BAMBU UNTUK MENJAGA

SUMBER MATA AIR DAN DEBIT AIR EMBUNG DALAM Mendukung PERTANIAN DAN EKOWISATA

Desa Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memiliki cara sendiri dalam menjaga debit air embung agar tetap stabil, yakni dengan melakukan konservasi bambu secara berkesinambungan. Alhasil, warga dan petani tidak perlu khawatir kekurangan air untuk lahan pertaniannya sehingga hasil panennya stabil. Bahkan, lingkungan sekitar embung bertambah asri hingga tempat itu menjelma menjadi salah satu tujuan wisata.

Latar Belakang

- Sebagian warga desa mendapatkan pasokan air dari embung yang sudah ada sejak lama
- Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada bercocok tanam dan pengairan lahan pertanian mereka juga tergantung pada air embung
- Debit air embung ditunjang oleh keberadaan beberapa sumber mata air di sekitarnya
- Sumber mata air memiliki siklus penyediaan air, yang sangat tergantung pada hutan bambu disekitarnya
- Beberapa kali dilaporkan terjadi penebangan bambu liar sehingga dikuatirkan mengancam keberadaan sumber mata air dan debit air embung, serta dampaknya pada pertanian
- Hutan bambu yang telah tumbuh sejak lama di sekitar embung belum dikelola dan dijaga dengan baik

Solusi

Konservasi Bambu untuk menjaga sumber mata air dan debit air embung

Proses

- Pemerintah Desa menyadari pentingnya sumber mata air embung di desanya bagi kebutuhan air warga dan ekonomi masyarakat, terutama di bidang pertanian
- Beberapa kali diterima laporan terjadi penebangan bambu liar yang merupakan penyangga keberadaan sumbermata air embung tersebut
- Pemerintah Desa mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mengenai pentingnya menjaga debit air embung, hingga diputuskan untuk melakukan konservasi bamboo yang berada di sekitar sumber mata air embung
- Pemerintah Desa dan warga mencari informasi terkait konservasi bambu dan dukungan ke berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Malang
- Pemerintah Desa menyampaikan wacana konservasi kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam sebuah kegiatan di desa yang mengundang Bupati dan beberapa Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) hingga mendapat akses komunikasi ke sejumlah instansi
 - o Pemerintah Desa melakukan komunikasi dengan Dinas Kehutanan terkait upaya konservasi bambu yang akan dilakukan
 - o Pemerintah Desa menjalin komunikasi dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas (BP DAS Brantas) melalui Dinas Kehutanan untuk mendapatkan bantuan teknis dan bantuan bibit terkait tanaman bambu
- Pemerintah Desa mengirimkan 30 warga desa untuk mengikuti pertemuan dan bimbingan teknis yang diadakan BP DAS Brantas. Unsur yang turut dalam bimbingan teknis adalah: perangkat desa, perwakilan BPD, dan tokoh masyarakat

- Pemerintah Desa mengumpulkan para peserta bimbingan teknis untuk musyawarah dan merumuskan langkah lebih lanjut pengelolaan sumber mata air dan hutan bambu di sekitarnya, hingga tercetus rencana pembentukan Kelompok Tani yang khusus menangani konservasi bambu, struktur organisasi serta tugas dan fungsinya
- Pemerintah Desa kemudian membentuk dan mengukuhkan Kelompok Tani khusus menangani konservasi bambu dengan tugas, fungsi dan formasi berikut:
 - o Kelompok Tani merupakan pelaku utama konservasi bambu agar bambu dan sumber mata air embung bisa berkelanjutan, dengan rencana kerja konservasi bambu dan pembagian tugas pemeliharaan dan perawatan hutan bambu
 - o Melengkapi fungsi penjaga hutan (waker) yang sudah ada, dengan pemeliharaan dan perawatan
 - o Kelompok Tani membuat AD/ART dan sanksi bagi pelanggar dalam upaya pengelolaan sumber mata air dan hutan bambu
 - o Kelompok Tani terdiri dari gabungan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, BPD dan perangkat desa dengan struktur organisasi: Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris
- Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa yang berisi penetapan Kelompok Tani yang diberi nama Kelompok Tani Boon Pring selaku pengelola konservasi bambu dengan tugas, fungsi dan formasi yang jelas
- Kelompok Tani dan Pemerintah Desa membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan bibit bambu ke BP DAS dan memperoleh 4.000 bibit bambu pada 2015, serta 4.000 bibit bambu dan 4000 bambu hias pada 2016
- Kelompok Tani melakukan pemetaan lahan yang memotret keberadaan embung, lahan bambu, dan kondisi sekitarnya
- Kelompok Tani melakukan penanaman bibit secara bertahap dengan mengacu pada peta lahan yang telah dibuat
- Perawatan bambu yang baru ditanam dilakukan secara berkala dan paralel dengan pemeliharaan hutan oleh petugas yang ditetapkan secara bergiliran
- Pemerintah Desa memasukkan kegiatan Kelompok Tani untuk konservasi bambu ini kedalam APBDes 2016
- Pemerintah desa menjadwalkan pertemuan rutin dengan poktan 1 sampai 2 kali setiap bulan untuk membicarakan perkembangan konservasi, perencanaan ke depan serta menjaga motivasi poktan dalam melakukan konservasi
- Desa Sanankerto menjadi sentra bambu berbasis ekowisata di Kabupaten Malang dan melengkapi areal hutan bambu dengan etalase kebun dengan berbagai jenis bambu (arboretum)
- Pemerintah Desa dan Kelompok Tani terus memperkaya spesies-spesies bambu baru untuk arboretum, salah satunya di sela-sela kunjungan tugas ke berbagai wilayah di tanah air

Pendanaan

- Dana Desa/APBDes mulai 2016
- Bantuan BP DAS Brantas 2015 dan 2016 dalam bentuk 8400 bibit bambu (termasuk bambu hias)
- Swadaya masyarakat

Pelaku

- Pemerintah Desa
- Kelompok Usaha Tani Bambu Boon Pring

Hasil

1. Sumbermata air embung terjaga sepanjang tahun, dengan debit air 700 liter per detik, dan mampu mengairi areal sawah seluas 260 Ha, sehingga hasil pertanian relatif stabil
2. Kebutuhan air warga desa di musim kemarau terjamin
3. Desa Sanankerto didapuk sebagai sentra bambu berbasis ekowisata oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dengan koleksi 14.000 pohon bambu dari 60 spesies berbeda

Pembelajaran

1. Pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam agar potensi yang sudah ada bisa dijaga dan dioptimalkan kapasitasnya
2. Desa perlu menemukenali potensi yang dimilikinya dan melibatkan segenap stakeholder untuk mengembangkannya
3. Inovasi-inovasi baru untuk mendukung potensi yang telah dimiliki akan membuka berbagai peluang baru bagi terciptanya potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Rekomendasi

1. Konservasi bambu (potensi ekowisata bambu) disekitar embung dapat terus ditingkatkan menjadi potensi wisata edukasi bambu, wisata alam dan penelitian
2. Perlu peraturan, baik peraturan adat maupun formal, terkait upaya menjaga kelestarian hutan bambu
3. Pemanfaatan dan pengelolaan hayati di lokasi tertentu di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung sumberdaya manusia dan dana yang memadai

Kontak Informasi

H. Subur, Kepala Desa (0822 327 863 33)

Jamaludin, Ketua Kelompok Tani Bambu Boon Pring (0821 403 557 59)

KAJIAN UNTUK MENENTUKAN TEKNOLOGI SUMUR DAN KETERSEDIAAN AIR DESA

Lembaga pengelola air bersih HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan kajian yang melibatkan tenaga profesional dalam perbaikan sumur, pada satu-satunya sarana air bersih yang dimiliki desa tersebut. Melalui kajian ini, sumber permasalahan macetnya air dapat ditemukan dengan jitu sehingga pengalokasian dana untuk perbaikan sumur dengan teknologi yang sesuai pun dapat lebih realistis. Hasilnya, kini warga bisa kembali menikmati air tanpa rasa was-was.

Latar Belakang

- Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki masalah dengan pasokan air bersih dari satu-satunya sumur sarana air bersih yang mereka miliki
- Setiap kemarau, warga harus rela menunggu lama untuk air sampai ke rumah, sehingga mandi, cuci, kakus dan masak pun terkendala
- Puncaknya terjadi pada 2007 saat kemarau panjang hingga lima bulan. Pasokan air sangat sedikit sehingga masyarakat melakukan protes ke Balai Desa.
- Pada saat membuat sarana air bersih pada tahun 2000, lembaga pengelola air bersih desa Sugihwaras, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang kini menjadi bagian unit usaha BUMDes, belum mengantisipasi kemarau panjang yang mungkin terjadi dan pengaruhnya pada sumur air
- Melihat kondisi demikian, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah memperbaiki sumur tersebut, namun HIPPAM tidak yakin sistem atau teknologi mana yang paling tepat untuk digunakan

Solusi

Melakukan kajian yang melibatkan tenaga profesional untuk memastikan perbaikan sumur menggunakan teknologi yang tepat

Manfaat

- HIPPAM mengetahui sumber permasalahan macetnya air
- Pengalokasian dana untuk perbaikan sumur dengan teknologi yang sesuai dan tepat guna dapat lebih realistis
- Air bersih dapat kembali dinikmati warga dengan lancar hingga ke rumah-rumah

Proses

- Ketua HIPPAM menerima keluhan dan protes dari masyarakat yang datang ke rumah dan balai desa
- Ketua HIPPAM menginventarisir masalah dan melakukan kajian awal ke dalam sumur menggunakan pipa untuk mengetahui posisi ketinggian air
- Hasil kajian awal dilaporkan kepada Kepala Desa. Guna menemukan solusi, HIPPAM mengajukan kebutuhan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pengeboran guna memastikan ketersediaan air

- HIPPAM melakukan komunikasi lanjutan dengan perwakilan RT/RW, lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), dan lembaga musyawarah desa (LMD) untuk pembiayaan kajian lanjutan tersebut dan perbaikan sumur
- Kajian lanjutan dilakukan dengan mendatangkan tenaga ahli profesional dari luar desa. Kajian lanjutan ini dilakukan dengan pengeboran sumur untuk mengetahui ketersediaan dan letak sumber mata air desa
- Hasil kajian:
 - a) Permukaan air di sumur ternyata menyusut hingga 20 meter
 - b) Level sumber air terbaik dan terbesar berada pada kedalaman 60-69 meter
- Hasil kajian lanjutan dibawa ke Pemerintah Desa Sugihwaras dan Kepala BUMDes Aneka Usaha
- Solusinya perbaikan sumur:
 - a) Mengganti sumur pompa sentrifugal dengan sumur submersible yang bisa mencapai kedalaman 60 meter
 - b) Sumur ditempatkan di kedalaman 28-32 meter agar tidak berat dan mencegah turunnya permukaan air
 - c) Mengganti dan menambah 2 sumur dengan diameter 6 inci dan diameter 8 inci

Pendanaan

- Dana Desa untuk pembenahan sumur Rp 32 juta
- Hadiah lomba untuk pendanaan tambahan
- Swadaya masyarakat

Pelaku

- Pengelola HIPPAM
- Tenaga ahli profesional
- Pemerintah Desa

Hasil

- Warga dapat kembali menikmati air bersih dengan lancar hingga ke rumah-rumah, dan pasokan air bersih menjangkau hingga pelosok desa
- Pasokan air bersih bisa dinikmati sepanjang hari
- Jumlah pelanggan air bersih naik dari 600 pelanggan menjadi 972 pelanggan. Seluruh warga Desa Sugihwaras telah terlayani air bersih
- Tidak ada lagi komplain terkait macetnya air dari pelanggan

Pembelajaran

- Persoalan air bersih harus cepat diselesaikan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
- Pelibatan tenaga profesional dapat membantu memastikan teknologi yang tepat dalam perbaikan sumur sehingga biaya yang dikeluarkan dapat lebih realistis
- Pendanaan dari desa memperlancar upaya perbaikan sarana air bersih yang merupakan kebutuhan utama warga

Rekomendasi

- Kajian terkait ketersediaan air, level sumber air terbaik dan terbesar di saat musim kemarau, sangat diperlukan sebelum menentukan sistem atau teknologi yang tepat untuk sarana air bersih yang akan digunakan

Kontak Informasi

Tarmudi, Ketua Unit Pengairan HIPAM BUMDes Aneka Usaha
HP: 0823 3052 6350

Cipto, Ketua BUMDes Aneka Usaha
HP: 0852 5941 8150

Kantor Desa:
Jalan Brawijaya Nomor 486, Sugihwaras, Kepohbaru, Bojonegoro

MERINTIS PRODUK UNGGULAN DESA

MELALUI BUAH NAGA

Masyarakat Desa Sukamaju yang sebelumnya petani kakao dan lada memperbaiki mata pencahariannya melalui budidaya tanaman buah naga. Hal ini dilakukan karena kondisi tanah dan ketinggian desa cocok untuk pengembangan budidaya buah naga, jangka waktu panen relatif cepat, serta harga jual bersaing. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Desa agar warganya menanam minimal 20 pohon buah naga di rumah atau tanah mereka. Alhasil, desa ini menjadi pemasok buah naga cukup diperhtungkan di Sinjai.

Latar Belakang

- Desa Sukamaju, Kecamatan Tellu Limpoe terletak di dataran rendah di Kabupaten Sinjai, dengan sumber penghasilan mayoritas penduduk desa adalah kakao dan lada
- Pada 2011, kondisi perekonomian terganggu karena wabah hama Penggerek Buah Kakao (PBK), busuk buah, dan turunnya harga kakao di pasaran. Demikian juga dengan lada, tanaman banyak yang mati karena hama busuk akar dan kekurangan air saat kemarau
- Meski mampu panen sepanjang tahun, namun dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk panen kakao jika mengganti tanaman kakao dari awal tanam
- Banyak kebun kakao dan lada yang tak menghasilkan sesuai harapan dan bahkan wabah hama menular ke pohon lain

Solusi

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui budidaya buah naga dan menjadikan buah naga sebagai produk unggulan desa

Proses

- Dua warga desa Sukamaju mendapat informasi tentang potensi budidaya tanaman buah naga yang melihat kesuksesan petani tanaman tersebut dari Kalimantan Timur dan cocok dengan kondisi desa yang berada di dataran rendah
- Warga desa tersebut membawa pulang beberapa stek tanaman buah naga untuk dicoba tanam di halaman rumahnya sebagai tanaman pengganti kakao dan lada yang sudah tidak produktif
- Hasil ujicoba ini menghasilkan panen pertama setelah 8 bulan masa tanam dan terjual cepat dengan harga Rp 26.000 per kg sehingga menarik perhatian beberapa masyarakat.
- Warga berbondong-bondong berkonsultasi dengan dua pionir buah naga di Desa Sukamaju ini tentang keinginan mereka mencoba menanam buah tersebut di pekarangan rumahnya masing-masing.
- Warga diberi gratis oleh sang pionir bibit buah naga dari stek pohon yang sudah berbuah
- Pada tahap awal penanaman buah naga, warga sering mendatangi rumah sang pionir dan berkumpul untuk berkonsultasi cara merawat buah naga yang baik
- Warga mulai menikmati panen buah naga dan hasilnya dikumpulkan di salah satu rumah warga untuk di-pool dan dijual bersama-sama ke pasar
- Melihat potensi panen yang besar dan serempak, warga mulai mencari jejaring pemasarandan mencari kemungkinan kerjasama dengan toko buah dan supermarket
- Salah satu warga mendapat kepercayaan untuk bekerjasama dengan supermarket ternama di kota sebagai pemasok buah naga segar dengan

- Tuntutan pasar akan buah naga yang semakin besar ini menarik perhatian Pemerintah Desa untuk mendorong budidaya buah naga tersebut sebagai komoditas desa
- Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Desa yang mewajibkan masyarakat menanam minimal 20 pohon buah naga di pekarangannya dengan tujuan mewujudkan Desa Sukamaju sebagai sentra buah naga kabupaten
- Pemerintah Desa memberikan subsidi stek bibit yang diperoleh dari pemangkasan pohon secara rutin, menampung hasil panen selama pemasaran belum stabil, membentuk kelompok tani, serta bergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah ada
- Belajar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi (hama penyakit, pemupukan)
- Belajar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi (hama penyakit, pemupukan) dengan memanfaatkan jaringan sebagai sumber informasi (sales pupuk dan obat-obatan tanaman)
- Warga dan Kepala Desa terus melakukan penetrasi pasar, baik kepada pedagang kecil maupun perusahaan besar
- Melibatkan warga desa yang tinggal di kota besar untuk membuka jaringan pasar dan menjalin kemitraan

Hasil

- 100% warga desa yang memiliki pekarangan dan lahan kosong menanam buah naga
- Pendapatan masyarakat meningkat sebesar 20% dibandingkan saat menjadi petani kakao dan lada
- Desa Sukamaju dikenal di Kabupaten Sinjai sebagai sentra buah naga yang memiliki narasumber budidaya tanaman buah naga
- Warga dapat menikmati 8 kali panen buah naga setiap tahun dengan hasil 30-40 ton setiap panen, dimana harga jual Rp 20.000/kg
- Pemasaran meluas hingga Makassar dan Kendari, dan telah menjalin kemitraan dengan Asosiasi Pedagang Buah.

Pembelajaran

- Inisiatif yang kuat dapat membawa perubahan signifikan dengan dasar pengetahuan yang baik dan mampu menunjukkan contoh nyata.

Rekomendasi

- Perlu melibatkan BUMDes dalam pemasaran sehingga dapat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PAD), bila BUMDes sudah dibentuk.
- Perlu pelatihan untuk produksi buah naga yang tidak layak jual/apkir agar diolah menjadi makanan olahan.
- Dengan semakin meluasnya jangkauan pemasaran, kualitas panen perlu dipertahankan.

Kontak Informasi

Kamaruddin, Kepala Desa Sukamaju
HP.08539987181

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA OLAHRAGA (SORGA) MULTIFUNGSI UNTUK MENGEMBANGKAN MINAT, BAKAT, DAN POTENSI WARGA DESA

Pemerintah Desa Sesela, Kecamatan Gunug Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyulap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi sarana olahraga multifungsi dengan menggunakan Dana Desa. Alhasil, kini desa tersebut memiliki wadah pengembangan bakat olahraga bagi remaja, sarana jalan sehat bagi orangtua dan lansia, tempat bermain yang aman bagi anak-anak, sekaligus kegiatan bermanfaat lainnya di bidang seni.

Latar Belakang

- Minat dan perhatian warga Desa Sesela terhadap olahraga cukup besar, tidak hanya di kalangan remaja, namun juga anak-anak dan lansia. Setiap dusun memiliki klub sepakbola dan olahraga lain
- Terdapat sebuah lapangan terbuka untuk sepakbola di pinggiran desa. Lapangan ini digunakan berlatih sejumlah klub sepakbola secara rutin dan bergantian
- Setiap tahun diselenggarakan turnamen sepakbola di lapangan tersebut, yang diikuti klub diluar kecamatan, bahkan kabupaten, dan setiap musim turnamen itupula Panitia membangun pagar bambu untuk membatasi penonton serta memisahkan dengan lahan parkir dan pedagang. Pengelolaan masih dilakukan secara musiman saat akan digelar turnamen
- Belum tersedia sarana olahraga untuk anak-anak dan lansia, sehingga banyak yang beraktivitas di jalan sehingga berisiko kecelakaan
- Terdapat lahan kosong (tempat sampah) di depan pasar dekat Kantor Desa, yang mengganggu aktivitas warga karena dekat dengan masjid dan sekolah, sehingga membatasi ruang warga dan tempat kegiatan anak sepulang sekolah.

Solusi

Membangun dan mengelola sarana olahraga multifungsi yang dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat.

Manfaat

- HIPPAM mengetahui sumber permasalahan macetnya air
- Pengalokasian dana untuk perbaikan sumur dengan teknologi yang sesuai dan tepat guna dapat lebih realistis
- Air bersih dapat kembali dinikmati warga dengan lancar hingga ke rumah-rumah

Proses

- Warga mengeluhkan sampah yang menggunung dan bau di depan pasar yang dekat dengan areal permukiman, pendidikan anak dan ibadah.
- Pemerintah Desa mencari solusi penanggulangan sampah tersebut

- Sejumlah dusun mengusulkan pengangkutan sampah ke tempat lain dan mengubah lahan di depan pasar tersebut menjadi sarana yang bermanfaat bagi warga. Ada yang mengusulkan sarana olahraga, seperti futsal, tempat hiburan, dan lain-lain
- Dari proposal dusun-dusun, mencuat usulan pembangunan lapangan futsal di areal depan pasar dan dalam Musrenbangdes menjadi prioritas pendanaan pada 2015
- Tahun berikutnya, berkembang usulan untuk menambah trek refleksi di sekitar lapangan futsal sebagai sarana olahraga bagi para manula yang selama ini berolah raga dengan berjalan kaki di sekitar desa dan disetujui didanai pada 2016
- Usulan warga untuk peningkatan sarana lapangan sepakbola, disetujui Pemerintah Desa untuk pembangunan bertahap mulai 2018.
- Pemerintah Desa melakukan revisi anggaran 2017 dan mempercepat peningkatan sarana lapangan sepakbola berupa pembangunan pagar tembok untuk penyelenggaraan Sesela Open Cup ke 13 Pada Agustus 2017
- Pada 2017, Pemerintah Desa juga merealisasikan usulan dusun lainnya dalam rangka mengoptimalkan area sebelah lapangan futsal yang juga mendapat persetujuan di Musrenbangdes adalah pembangunan panggung untuk pertunjukan, pameran atau upacara
- Pihak desa menunjuk Karang Taruna untuk mengelola lapangan futsal, terutama untuk mengatur jenis kegiatan dan jadwal penggunaan sarana
- Pengelola lapangan sepakbola dipilih dan ditentukan dalam Musyawarah Desa, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur jadwal penggunaan lapangan dan penyelenggaraan turnamen.

Hasil

- Warga memiliki alternatif sarana olahraga
- Anak-anak tidak lagi bermain di jalan karena tersedia lapangan yang dapat digunakan untuk berkegiatan
- Orangtua memiliki tempat untuk jalan sore di trek refleksi
- Klub-klub bola lebih tertata latihannya dan pengembangannya
- Desa Sesela menjadi tempat belajar untuk desa lain dalam pengelolaan Dana Desa

Pembelajaran

- Pembangunan desa yang berawal dari kebutuhan masyarakatnya dapat menjadi input dalam penggunaan Dana Desa untuk turut membantu mengembangkan minat serta bakat warga.

Rekomendasi

- Membentuk klub sepak bola desa dan mencari pelatih untuk lebih mengembangkan klub sepak bola Desa Sesela.
- Menyewakan lapangan untuk berlatih futsal warga luar desa sehingga tersedia dana perawatan
- Menyebarkan keberadaan lapangan futsal yang dapat disewa ke desa-desa di sekitarnya

Kontak Informasi

Kepala Desa, Amin AS, 087865912124

Sekdes, Farman Andi Triwidardi, 087865580988

Pengurus Lapangan Futsal, Azwadi, 087864222602

PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR MELALUI KONSERVASI HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL OLEH PEMERINTAH DESA

Desa Genggeling menyelamatkan sumber mata air melalui konservasi hutan berbasis kearifan lokal. Awig-awig telah dimiliki secara turun temurun namun selama ini hanya disimpan dalam ingatan sejumlah tokoh masyarakat. Pada 2016, Pemerintah Desa memutuskan untuk mendokumentasikan awig-awig tentang lingkungan hidup agar dapat dikenal dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Dampak dari upaya tersebut adalah lebih tertatanya hutan, terjaganya sumber mata air sehingga kebutuhan air bersih warga terjamin dan terkelola baik, terbentuknya wisata desa yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan meredam konflik.

Latar Belakang

- Desa Genggeling terletak di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, terletak di wilayah hutan dan memiliki beberapa sumber mata air yang menjadi tempat bergantung masyarakat, namun terancam keberlangsungannya karena adanya penebangan pohon oleh perusahaan
- Di Desa Genggeling juga terdapat sumber mata air, yakni Kakong, yang merupakan sumber penghidupan masyarakat dan menjadi sumber air bagi 3 air terjun desa tersebut
- Desa Genggeling memiliki awig-awig turun-menurun tentang pengelolaan lingkungan di wilayah desa namun tidak pernah terdokumentasikan
- Di Desa Genggeling banyak remaja usia produktif yang belum bekerja, yang kadang berkelahi hanya karena masalah kecil.
- Pada 1999, perusahaan penebang hutan yang telah berada di Desa Genggeling selama 30 tahun tersebut dipaksa keluar oleh masyarakat karena dianggap merugikan masyarakat
- Tahun 1999-2002 menjadi masa kritis penataan ulang pengelolaan hutan oleh desa dengan fokus pada penyelamatan sumber mata air dan menata ulang pengelolaan hutan dalam kondisi dimana masyarakat sangat rentan dan sensitif terhadap upaya tersebut dan awig-awig yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Solusi

Melakukan kajian yang melibatkan tenaga profesional untuk memastikan perbaikan sumur menggunakan teknologi yang tepat

Manfaat

- Masyarakat dapat menuai manfaat dari hasil hutan, antara lain dari kopi dan pariwisata.

Proses

- Selama 2000-2010, pihak Pemerintah Desa melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait awig-awig yang berisi peraturan adat
- Masyarakat dan Pemerintah Desa bermusyawarah untuk mendiskusikan penataan ulang desa dan hutan pasca perginya perusahaan penebang hutan

- Pemerintah Desa menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam rangka penataan ulang desa dan dibantu DinHut dengan kegiatan rehabilitasi melalui hibah bibit-bibit pohon.
- Kepala Desa memutuskan untuk mendokumentasikan awig-awig tentang lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat mulai tertata
- Isi awig-awig tersebut antara lain:
 - Tidak mensertipikatkan lahan hutan
 - Tidak melakukan illegal logging
 - Tidak meneres kayu/melangke
 - Tidak bermukim di dalam kawasan
 - Tidak menggembalakan ternak di dalam kawasan
 - Tidak menanam tanaman semusim (padi, jagung, cabe, dsb)
 - Tidak membajak, mengolah tanah
 - Tidak membakar kawasan
 - Tidak menanam kelapa
 - Tidak membuat pondok melebihi ukuran 2x3 meter
 - Tidak meracuni tanaman/menggunakan pestisida
- Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat mensosialisasikan awig-awig yang telah ditulis ke seluruh warga desa dengan berkeliling dari dusun ke dusun, dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah lain.
 - Muncul protes dari warga karena dianggap awig-awig tidak sesuai dengan perkembangan jaman sehingga dilakukan musyawarah kembali untuk membahas pembaruan awig-awig dan dihasilkan awig-awig yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
 - Riak-riak konflik beberapa kali terjadi kembali dan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
- Pemerintah Desa lalu berkeliling ke dusun-dusun dan melakukan mapping permasalahan untuk menjaga terjadinya konflik lain hingga terbentuk konsensus terbaru antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam penerapan awig-awig.
- Pemerintah Desa memanfaatkan kebiasaan pemuda desa yang biasa 'nongkrong' di hutan untuk membantu mengelola hutan dan memanfaatkan beberapa lokasi tempat para pemuda mencari sinyal yang mereka buat di atas pohon sebagai objek wisata.
 - Upaya tersebut melahirkan kegiatan pariwisata desa yang terkelola dan menjauhkan para pemuda dari kegiatan semula yang mengganggu masyarakat karena sibuk dan fokus dalam Pokdarwis.
- Membentuk BUMDes dengan bidang dan struktur pengurus melalui musyawarah desa:
 - PAMDes
 - Pokdarwis
 - LKM
 - Penciptaan usaha baru
 - Unit pengelola hutan
 - Pengembangan usaha

Pendanaan

- Swadaya
- Dana desa

Pelaku

Kepala Desa, tokoh masyarakat, pemuda/remaja.

Hasil

- Terjadi perubahan cara pikir masyarakat dari pengguna hutan menjadi penjaga tata kelola hutan.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga anak-anak bisa sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dan warga dapat melaksanakan ibadah haji.
- Hutan dapat terkonservasi sehingga
 - sumber mata air terjaga
 - masyarakat dapat menikmati air bersih hingga ke rumah sampai sekarang
 - perkebunan
 - pariwisata
 - pengangguran berkurang
 - konflik remaja
 - kenyamanan warga
 - pemasukan desa

Pembelajaran

- Merubah paradigma berpikir masyarakat dapat dilakukan melalui investasi waktu yang panjang dan fleksibilitas sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
- Awig-awig tidak hanya sebatas menjadi sebuah kearifan lokal yang diakui secara lisan saja oleh masyarakat, tetapi dapat dijadikan rujukan peraturan dalam menata dan mengelola kegiatan desa.

Rekomendasi

- Perlu dirancang sebuah PERDES yang dapat memberikan ketegasan dalam upaya konservasi hutan dan pengelolaan sarana air bersih (rekomendasi awig-awig dapat menjadi acuan agar menjadi PERDES terkait dengan konservasi hutan dan pengelolaan sarana air bersih).

Kontak Informasi

Bapak Haeril, Kepala Desa Genggelang
Pak Dodi (Pemerhati Konservasi Hutan Desa) 085339420601

MENGAMANKAN PENDAPATAN DESA WISATA MELALUI PENERAPAN E-TICKETING

Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menerapkan sistem elektronik tiket (e-ticketing) dalam mengelola objek wisata disana. Hasilnya, pengelolaannya menjadi lebih transparan, jumlah wisatawan dan pemasukan terdata dengan baik, hingga potensi kebocoran Pendapatan Asli Desa (PAD) pun dapat dicegah.

Latar Belakang

- Desa Nglanggeran memiliki tiga tujuan wisata utama di tiga dari lima dusun disana, yakni Gunung Api Purba (GAP), Embung Nglanggeran dan Air Terjun Kedung Kandang
- Pengelolaan objek wisata berpotensi konflik:
 - o Pengelolaan objek wisata dan keuangannya selama ini mengandalkan kepercayaan pada orang tertentu
 - o Jumlah staf yang terlibat relatif banyak, yakni 154 orang dan belum terkoordinasi dengan baik
 - o Jumlah dana yang dikelola semakin banyak dengan naiknya tiket masuk dari Rp 500/orang (1990) menjadi Rp 15.000/orang (2015)
 - o Jumlah wisatawan terus meningkat setelah kunjungan Sultan ke desa Nglanggeran

Solusi

Mengelola objek wisata desa dengan sistem e-ticketing untuk meningkatkan transparansi, mencegah potensi kebocoran dan konflik horizontal

- Desa Nglanggeran menerapkan e-ticketing untuk pengelolaan data keuangan dan jumlah kunjungan secara transparan, dan dapat diakses secara real time.

Manfaat

1. Meningkatkan transparansi pengelolaan objek wisata dan keuangannya
2. Menghindari kebocoran dana, memaksimalkan pengelolaan keuangan objek wisata
3. Meningkatkan tertib administrasi, mudah mengetahui jumlah kunjungan, pendapatan tiket, dan parkir secara real time
4. Mengurangi penggunaan kertas, sehingga mendukung pelestarian lingkungan
5. Meredam konflik horizontal

Proses

- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nglanggeran yang menjadi pengelola objek-objek wisata disana, kerap mendapat informasi terkait konflik horizontal dalam pengelolaan objek wisata di sejumlah desa. Diantaranya terkait status lahan dan keuangan
- Pokdarwis melakukan diskusi internal guna mencari solusi untuk mencegah konflik tersebut di kemudian hari, termasuk pengelolaan keuangan secara transparan, hingga muncul gagasan penerapan sistem e-ticketing
- Pokdarwis membentuk tim kecil untuk mematangkan gagasan dan mencari informasi lebih lanjut terkait e-ticketing kepada sejumlah pihak, seperti ahli komputer atau TI (teknologi Informasi) di sekitar desa, hingga terkumpul informasi yang dibutuhkan

- Berdasarkan informasi yang diperoleh, tim memetakan kebutuhan untuk pembuatan sistem e-ticketing dengan potensi yang dimiliki, termasuk potensi sumberdaya manusia (SDM), alat dan keuangan
- Berdasarkan hasil pemetaan, tim membuat perencanaan untuk merealisasikan sistem e-ticketing tersebut
 - o Membuat daftar alat yang dibutuhkan dan akan dibeli: seperangkat komputer, server, UPS dan printer
 - o Sistem jaringan intranet beserta transmisinya untuk menyatukan ketiga objek wisata yang dikelola: tower, kabel microtic
 - o Membuat daftar rekanan yang dibutuhkan untuk membuat program, jaringan, pengadaan barang dan jasa (SDM untuk mengelolanya)
 - o Melakukan survey harga melalui internet dan mendatangi beberapa toko peralatan komputer
 - o Menyusun RAB
 - o Rencana penggunaan dana dari Kas Pokdarwis hasil pengelolaan tiket sebelumnya
 - o Rencana kontribusi ke Kas Desa dan BUMDes sebesar 1% pendapatan
- Setelah kebutuhan alat dan anggaran disusun, Pokdarwis menyampaikan gagasan ini kepada forum musyawarah warga desa "Selasa Kliwon" untuk mendapatkan persetujuan. Forum terdiri atas Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan agama, dan kelompok masyarakat lainnya
- Setelah mendapat persetujuan, Pokdarwis melakukan pembagian tugas sesuai perencanaan:
 - o Penanggung jawab pembelian alat
 - o Penanggung jawab instalasi alat dan transmisi
 - o Penanggung jawab pencarian programmer untuk membuat sistem e-ticketing dan SDM pengelola e-ticketing
 - o Seluruh transaksi dilengkapi dengan bukti pembelian dan bukti pembayaran
 - o Pemilihan programmer/SDM lain didasarkan pada kemampuan personal, diutamakan warga setempat untuk memudahkan komunikasi yang intens, baik secara offline maupun online, aktif dan selalu siap saat dibutuhkan
- Setelah instalasi komputer, jaringan terpasang dan program dibuat, dilakukan ujicoba sistem e-ticketing di salah satu lokasi selama satu bulan
- Proses ujicoba ini dilakukan berbarengan dengan pelatihan SDM yang akan bertugas di e-ticketing setiap Selasa malam selama dua bulan, sekaligus sosialisasi sistem ke semua anggota Pokdarwis
- Selama ujicoba, tim Pokdarwis mengetahui kebutuhan real SDM untuk menjalankan dan memelihara sistem e-ticketing:
 - o Diberlakukan pembagian shift: pagi-siang dan siang-malam (pagi)
 - o Setiap shift ---- orang
 - o --- TI yang standby untuk mengatasi error sistem atau mati lampu
 - o --- petugas pencatat manual sebagai back-up
- Membuat WA Group dengan anggota semua petugas e-ticketing di lapangan, tim TI internal Pokdarwis, termasuk programmer untuk tujuan meningkatkan pelayanan dengan respons cepat
- Pemeliharaan secara rutin setiap minggu oleh Tim TI Pokdarwis, meliputi pengecekan -----
- Pokdarwis, Pemerintah Desa dan masyarakat melalui forum "Selasa Kliwon" bermusyawarah menentukan harga tiket masuk dan parkir:
 - o Tiket masuk: domestik Rp15.000 per orang, asing Rp 30.000 per orang
 - o Parkir: bus Rp 15.000, mobil Rp5.000, sepeda motor Rp 2.000
 - o Paket menginap (kamping) Rp 20.000
 - o Pemandu wisata Rp 70.000

Pendanaan

Kas Pokdarwis hasil pengelolaan tiket sebelumnya

Pelaku

- Pokdarwis
- Tokoh pemuda/Karang Taruna
- Pemerintah Desa

Hasil

- Jumlah wisatawan terdata dengan puncak kunjungan lebih dari 325.000 orang dalam setahun
- Penerimaan melalui tiket dan parkir terdata dengan omset terbesar lebih dari Rp 1,8 miliar dalam setahun
- Alokasi untuk kas desa dan BUMDes relatif terukur sehingga memudahkan perencanaan
- Peningkatan pendapatan ---- rata-rata Rp 17 juta/bulan
- Pengelolaan wisata desa menjadi lebih transparan dan dapat dimonitor melalui situs www.nglanggeran-patuk.desa.id

Pembelajaran

- Penerapan e-tickecting membuat semua pihak sadar akan manfaat tertib administrasi: mudah mengelola, hemat waktu, dan transparan
- Pengelolaan berbasis sistem dapat meredam konflik karena lebih transparan

Rekomendasi

- Pelaksanaan e-ticketing akan dapat berjalan secara jangka panjang apabila terdapat kolaborasi antara Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda/ karang taruna
- Pendataan jumlah kunjungan wisatawan bisa menjadi sarana untuk memonitor daya dukung kawasan agar terjaga dari kerusakan dan pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan kualitas kunjungan wisata.

Kontak Informasi

1. Senen, Kepala Desa Nglanggeran, HP:081804252032
2. Sugeng Handoko, Sekretaris Pengelola Ekowisata GAP, HP: 081802606050, email: handoko88-jogja@yahoo.co.id
3. Aris Budiyo, Ketua Karang Taruna Purba Mandiri, HP: 081804138610, email: budiyoaris8@gmail.com

UPAYA DESA MENGHIDUPKAN KEMBALI BUMDes YANG DIBEKUKAN

BUMDes Ganeas Sejahtera di Desa Ganeas, Kabupaten Sumedang didirikan pada tahun 2008 namun terpaksa dibekukan pada tahun 2013 karena tidak berjalan dengan manajemen yang baik. Melihat pentingnya BUMDes bagi perkembangan perekonomian desa, Pemerintah Desa Ganeas menghidupkan kembali BUMDes tersebut hingga kini kembali beroperasi dengan layanan dan jumlah anggota yang terus berkembang.

Latar Belakang

- BUMDes didirikan pada tahun 2008 namun tidak berdasarkan analisa usaha yang baik sehingga usaha penggemukan sapi (2008-2013) tidak menguntungkan. Jumlah sapi menyusut dari 13 ekor (senilai Rp 117 juta) menjadi 8 ekor (senilai Rp 64 juta).
- Pengawasan dan pengelolaan aset BUMDes tidak dilakukan dengan baik karena pengurus BUMDes tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi atau mengurus bisnis.
- Persoalan yang melilit BUMDes membuat kepengurusan organisasi dan penyelenggaraan badan usaha dibekukan pada 2013.
- Pemerintah Desa masih melihat adanya potensi BUMDes bagi perkembangan perekonomian desa.

Solusi

Menghidupkan kembali BUMDes yang dibekukan dengan melakukan perbaikan kepengurusan dan tata kelola badan usaha.

Manfaat

BUMDes bisa kembali berkegiatan dan mengembangkan unit usaha.

Proses

- Pemerintah Desa berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DMPD) Kecamatan Ganeas.
- Konsultasi menghasilkan rekomendasi pembentukan tim transisi pengurus dan penyesuaian program BUMDes dengan postur anggaran yang tersedia.
- Kepala Desa menginisiasi musyawarah dusun yang menghasilkan kesepakatan pembentukan tim transisi pengurus yang beranggotakan tiga orang. Tim transisi tidak memiliki struktur jabatan dan diisi oleh Kepala Desa, perwakilan DPMD Kabupaten, dan perwakilan DPMD Provinsi.
- Tugas tim transisi pengurus antara lain:
 - a) Menginventarisasi permasalahan, aset, dan nasabah BUMDes.
 - b) Merancang pengelolaan bisnis BUMDes.
 - c) Mempersiapkan kepengurusan baru.
- Tim transisi berkoordinasi dengan DPMD Kecamatan Ganeas untuk menyampaikan calon pengurus baru termasuk program-program yang akan dijalankan.

- Pada 18 Agustus 2016, Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang BUMDes Ganeas Sejahtera yang diikuti oleh surat keputusan pengurus baru.
- Sebagai tahap awal, BUMDes menjalankan unit usaha simpan pinjam, pengelolaan sampah rumah tangga, dan penyaluran modal untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Aspek yang diperhatikan dalam menghidupkan kembali BUMDes yakni:
 - a) Unit usaha BUMDes baru dibentuk berdasarkan hasil analisis usaha.
 - b) Unit usaha memiliki intensitas interaksi tinggi dengan masyarakat.
 - c) Pengurus yang ditunjuk berasal dari kalangan profesional dan aktivis desa.
 - d) Bendahara dan pengelola keuangan BUMDes memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.
 - e) Menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan periodik.
 - f) Sistem pengelolaan aset berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - g) Menerapkan sistem verifikasi penerima manfaat secara berlapis.

Pendanaan

Modal awal berasal dari sisa saldo pengurus BUMDes sebelumnya dan penyertaan modal desa.

Pelaku

- Pemerintah desa
- Tim transisi (kepala dusun, ketua RT, dan profesional desa)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DMPD) Kecamatan Ganeas

Hasil

- Sampai Juni 2017, unit usaha simpan pinjam telah memiliki 52 anggota. Penyaluran pinjaman kepada 38 anggota sebesar Rp 39,9 juta.
- Total aset naik 65 persen dari Rp 29 juta menjadi Rp 48 juta.
- Unit usaha pengelolaan sampah terpadu telah memiliki 3 unit kendaraan pengangkut sampah dan 1 buah gedung pemilahan sampah. Unit ini melayani 52 kepala keluarga.

Pembelajaran

- BUMDes harus dijalankan oleh tenaga profesional dan menganut prinsip tata kelola usaha yang baik.
- Perbaikan dan pengembangan BUMDes perlu dikonsultasikan dengan pihak yang berpengalaman.
- Pembentukan dan evaluasi BUMDes harus melibatkan masyarakat

Rekomendasi

- Pemerintah desa perlu berperan aktif untuk mendukung keberadaan BUMDes.
- Upaya yang ditempuh Pemerintah Desa Ganeas bisa diaplikasikan oleh desa lain yang BUMDes-nya mengalami persoalan serupa.

Kontak Informasi

Kepala Desa Ganeas Omas Sudarsana
HP : 082116039651

Ketua BUMDes Cece Suarsa
HP : 081381196756
Email : cecesuarsa77@gmail.com

Alamat BUMDes:
Jalan Raya Raden Umar Wirahadikusuma No. 350 Km 07 Ganeas, Sumedang

MENGUBAH LIMBAH MINYAK GORENG

MENJADI PAD

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari mengolah limbah minyak goreng (jelantah) untuk dipasok kepada PT. Tirta Investama (Aqua Danone) sebagai produk campuran bahan bakar. Melalui kerja sama tersebut, BUMDes mampu mengubah limbah minyak goreng menjadi pendapatan bagi desa serta bisa mengurangi pencemaran limbah di sungai.

Latar Belakang

- Persoalan sampah dan limbah di Desa Panggunharjo makin bertambah seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman di perdesaan.
- Banyak warga membuang limbah minyak goreng sembarangan yang mencemari sungai di sekitar desa.

Solusi

- Mengolah limbah minyak goreng menjadi produk campuran bahan bakar bagi industri.
- Menjalinkan kerja sama berkelanjutan dengan perusahaan swasta sebagai penjamin pasar.

Manfaat

- Mengurangi pencemaran limbah di sungai.
- Memberdayakan dan mengedukasi masyarakat dalam pengolahan limbah.
- Mengubah limbah menjadi pendapatan asli desa (PAD).

Proses

- Melihat persoalan sampah dan limbah semakin bertambah, pemerintah desa dan BUMDes menggelar musyawarah desa sebanyak dua kali pada 2014. Dalam rapat tersebut dibahas pengembangan bentuk usaha BUMDes yang tidak terpaksa pada pengelolaan sampah.
- Diperoleh gagasan untuk mengolah limbah minyak goreng rumah tangga yang sering dibuang warga ke sungai.
- Gagasan dilatarbelakangi informasi dari Kepala Desa Panggunharjo Wahyudi Anggoro Hadi yang pernah membuat penelitian biji buah Nyamplung sebagai bahan bakar biodiesel.
- BUMDes Panggung Lestari bekerja sama dengan bengkel untuk membuat mesin filterisasi limbah minyak goreng.
- Komponen mesin yang digunakan antara lain:
 - a) Bak penampung minyak goreng bekas
 - b) Mesin pompa air
 - c) Penyaring (karbon, resin, dan tisu)
 - d) Jeriken penampung hasil filterisasi.
- Cara kerja mesin:
 - a) Minyak goreng bekas dimasukkan ke bak penampung awal lalu dipompa dan dipanaskan.
 - b) Kemudian minyak goreng bekas tersebut masuk ke alat penyaring dan dialirkan ke jeriken-jeriken penampung.
 - c) Pompa digerakan dengan diesel.
 - d) Hasil pengolahan limbah minyak goreng memiliki tingkat kejernihan hingga 0,5 milimikron.

- Pengolahan limbah minyak goreng dilakukan di tempat terpadu penampungan sampah dan produksi kompos.
- Kepala desa mendapat informasi jika Danone Aqua sedang mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari mesin pabriknya.
- Pemerintah desa dan BUMDes mendatangi Danone Aqua untuk bekerja sama memasok olahan limbah minyak goreng sebagai campuran bahan bakar solar penggerak mesin blower (pembersih galon).
- Untuk mengkoordinasikan pengumpulan minyak goreng bekas dari warga desa, pabrik-pabrik tahu, dan restoran, BUMDes membentuk Bank Tigor (tilasan gorengan).
- Bank Tigor:
 - a) Dibentuk dari kumpulan perwakilan PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga) tingkat RT (rukun tetangga).
 - b) Ada 11 Bank Tigor yang mengurus pengumpulan minyak goreng bekas di 118 RT.
 - c) Bank Tigor membeli minyak goreng bekas dari warga seharga Rp 2.000 per liter. Uangnya berasal dari kas pribadi.
 - d) Bank Tigor menjual minyak goreng ke BUMDes dengan harga Rp 4.000 per liter.
- Kebutuhan akan minyak goreng sangat tinggi sehingga BUMDes lalu merekrut tenaga lepas dari warga desa untuk mengepul minyak goreng bekas ke berbagai desa sekitar hingga luar kabupaten. BUMDes hanya bisa mengirimkan minyak goreng terfilterisasi sebanyak 5000 liter dari kebutuhan Danone sebanyak 8.000 liter per bulan, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan Danone.
- Olahan limbah minyak goreng dipakai sebagai campuran bahan bakar dengan komposisi 70 persen (solar) dan 30 persen (minyak terfilterisasi).

Pendanaan

- Modal awal BUMDes dari dana desa.
- Pengadaan mesin filterisasi dari dana desa.
- Pembangunan tempat sampah terpadu dari bantuan pemerintah provinsi melalui program Tempat Pembuangan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle).

Pelaku

- Pemerintah desa
- BUMDes
- Warga

Hasil

- Setiap bulan sekitar 3.000 liter limbah minyak goreng bisa diserap dari warga, pabrik tahu, dan restoran.
- Selama tahun 2016, BUMDes Panggung Lestari memasok olahan minyak goreng bekas sebanyak 32 ribu ton dengan harga jual Rp 8.600 per liter.
- Pendapatan kotor BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2016 naik menjadi Rp 1,5 miliar dari Rp 700 juta pada tahun 2015.
- Kesadaran untuk menjaga lingkungan meningkat.
- Tidak ada lagi limbah minyak goreng mengotori sungai.

Pembelajaran

- Persoalan limbah di lingkungan tempat tinggal bisa dilihat sebagai potensi untuk menghasilkan pendapatan.
- Perlu upaya bersama-sama dan kreatif dalam mengatasi persoalan lingkungan.
- Mesin pengolah limbah bisa dibuat sendiri dengan pengetahuan dan kemampuan teknis perbengkelan.

Rekomendasi

- Perlu tenaga pengepul lebih banyak dan jangkauan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan industri.
- Kerja sama dengan perusahaan perlu digalakkan sebagai opsi untuk memberdayakan perekonomian desa.
- Pengolahan limbah minyak goreng terfilterisasi bisa menjadi alternatif bagi desa-desa yang memiliki persoalan serupa.
- Desa perlu memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu yang bisa mengolah sampah dan limbah.

Kontak Informasi

Kepala desa + inovator Wahyudi Anggoro Hadi
HP: 081328004697
email: wahyudi.979797@gmail.com

Ketua BUMDes Panggung Lestari Eko Pambudi
HP: 087839587889
email: ekopambudipandes@gmail

Alamat :

Jl. KH. Ali Maksum, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta Telepon:
(0274) 377863

UPAYA PEMERINTAH DESA MENGUJI KELAYAKAN KINERJA BUMDES SEBELUM MEMBERIKAN MODAL KERJA

Desa Aik Bual membentuk BUMDes untuk mendukung pengelolaan potensi desanya yang melimpah. Namun Pemerintah Desa tidak serta merta memberikan modal untuk kegiatan BUMDes. Sebelum mengalokasikan Dana Desa, Pemerintah Desa mendorong BUMDes untuk memperlihatkan kinerjanya terlebih dahulu secara swadaya sebagai uji kelayakan perolehan modal. Arahan Pemerintah Desa yang semula menuai protes tersebut akhirnya menunjukkan upaya-upaya kegiatan yang dilakukan secara swadaya dan menjadi dasar pengalokasian Dana Desa.

Latar Belakang

- Desa Aik Bual memiliki potensi dan kekayaan hutan yang sangat melimpah namun juga terancam dalam ketersediaan air bersihnya karena lokasi sumber mata air berada di luar desa di kabupaten yang berbeda.
- Pemerintah Desa dan masyarakat mulai membahas tentang pengelolaan potensi desa sejak tahun 2011 dan muncul ide untuk membentuk KUD atau Koperasi Simpan Pinjam, namun belum ada kesepakatan.
- Pada tahun 2014, BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa lengkap dengan struktur organisasi pengurusnya yang terdiri dari perwakilan tiap dusun di Desa Aik Bual dengan visi untuk mengelola potensi desa dan menyerap tenaga kerja.

Solusi

Pemerintah Desa mendorong pelaksanaan kegiatan BUMDes secara mandiri dan swadaya sebagai upaya menguji kelayakan kinerja BUMDes sebelum mengalokasikan Dana Desa

Proses

- Pemerintah Desa dalam musyawarah dusun (MusDus) rutinnya mensosialisasikan kegiatan-kegiatan desa dan mendapat masukan dari dusun tentang kegiatan desa.
- Karena di setiap dusun ada perwakilan pengurus BUMDes, di MusDus selalu muncul usulan terkait modal kerja BUMDes. Semua dusun menyampaikan usul yang sama tentang modal kegiatan BUMDes sehingga isu tersebut mendapat perhatian utama.
- Menanggapi usulan tentang modal kerja BUMDes tersebut, Pemerintah Desa berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyarankan perlunya kehati-hatian karena BUMDes merupakan lembaga baru.
- Berdasarkan konsultasi dengan BPD tersebut, Pemerintah Desa Aik Bual memutuskan untuk menguji kinerja BUMDes terlebih dahulu sebelum mengalokasikan Dana Desa.
- Pemerintah Desa mengarahkan kepada BUMDes agar melakukan kegiatannya secara swadaya. Arahan tersebut awalnya ditentang oleh pengurus BUMDes.
- Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama pengurus BUMDes dan dicapai kesepakatan agar BUMDes melakukan kegiatannya secara swadaya dengan jaminan pengalokasian dana desa jika menunjukkan kinerja yang baik.
- Upaya masyarakat dalam menopang kegiatan BUMDes Aik Bual yang dilakukan secara swadana adalah:

- PAMDes: sosialisasi dan pemetaan lokasi warga terhadap sumber air; pengaturan penggunaan air; kerja sama dengan Desa Prian, Kecamatan Montong Gading untuk pemanfaatan sumber air, melakukan pendekatan dan mengundang salah satu warga Desa Prian untuk menjadi pengurus PAMDes;
- Kelompok-kelompok KUB: PERMATA (Perlindungan Mata Air), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), pertanian. Kelompok-kelompok ini mengumpulkan uang secara swadaya melalui iuran anggota. Kelompok pertanian sanggup mengumpulkan sebanyak Rp 80 juta dalam 8 bulan.
- Fasilitasi kelompok gula aren: mendatangkan pelatih untuk produksi gula semut, gula aren, dan gula cakep.
- Pengelolaan pasar yang telah dibangun oleh desa dan wisata embung oleh pemuda yang tergabung dalam PERMATA.
- Pemerintah Desa mengalokasikan dana pada tahun 2016 sebesar Rp 40 juta sebagai aset awal BUMDes.
- BUMDes mengajukan proposal ke Pemerintah Desa untuk modal kerja Rp225 juta dan Pemerintah Desa menyetujuinya dengan memasukkannya ke dalam RKPDes 2017.
- Pencairan dana Rp 225 juta dilakukan secara bertahap di tahun 2017 seiring dengan kesiapan BUMDes dalam melakukan kegiatannya dan menggunakan anggaran.

Hasil

- BUMDes mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah desa.
- Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa berturut-turut pada 2016 dan 2017.
- Keberlanjutan warga untuk menikmati air bersih lebih terjamin dengan adanya kerja sama BUMDes dengan Desa Prian di mana sumber mata air berada.
- Selain untuk mengairi sawah dan perkebunan, embung desa menjadi salah satu pilihan objek wisata.
- Terbentuk Rumah Produksi yang akan menaungi dan meningkatkan kualitas produksi gula aren untuk memenuhi standar kesehatan guna mendapatkan sertifikasi.
- Produk pertanian desa yang layak jual, termasuk usaha gula aren, menjadi lebih beragam dan terorganisir dengan adanya fasilitasi pelatihan melalui Rumah Produksi.

Pembelajaran

- Pengembangan BUMDes secara swadaya, swadana dapat dilakukan bila kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa sehingga menjadi prioritas seluruh warga desa.

Rekomendasi

- Walaupun BUMDes dirintis secara mandiri, sebaiknya dibuat rencana kerja agar proses upaya uji kelayakan kinerjanya lebih terarah menuju visi dan tujuan yang sama. Hal tersebut dapat digunakan sebagai benchmark situasi sebelum adanya alokasi Dana Desa bilamana akan melakukan evaluasi.

Kontak Informasi

1. Kepala Desa Aik Bual
Bapak Zulkurnain / 087865830470
2. Direktur BUMDes Aik Bual
Bapak Hairul Anam, S.Sos I / 081917968978

MEMANFAATKAN ALIRAN SUNGAI MENJADI DESA MANDIRI ENERGI

Desa Batang Uru, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan infrastruktur sehingga geliat perekonomian desa lambat dan kegiatan warga di malam hari pun terbatas. Namun desa ini kemudian memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber penggerak pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Upaya ini membuat seluruh rumah di desa bisa mendapatkan akses listrik secara mandiri hingga kegiatan usaha rumahtangga pun menggeliat.

Latar Belakang

- Pada 1990-an, akses menuju Desa Batanguru tergolong sulit karena desa terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan infrastruktur, terutama listrik.
- Anak-anak memanfaatkan lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan untuk belajar di malam hari.
- Puskesmas hanya bisa melayani warga pada siang hari lantaran tidak adanya penerangan di malam hari.
- Mata pencaharian warga terbatas pada bertani atau berladang, dan tidak ada usaha ekonomi yang memadai karena tidak ada listrik.
- Desa Batanguru memiliki sungai-sungai yang aliran airnya deras sehingga memberikan ide kepada seorang warga untuk memanfaatkannya sebagai sumber tenaga turbin PLTMH.

Solusi

- Memanfaatkan aliran sungai untuk menjalankan PLTMH.
- Membuat turbin sebagai komponen penggerak generator PLTMH.

Manfaat

- Warga bisa mendapatkan akses listrik untuk penerangan dan pelayanan kesehatan.
- Akses listrik menggerakkan perekonomian desa.

Proses

- Potensi aliran sungai-sungai di Desa Batanguru menggerakkan seorang warga desa bernama Linggi untuk memanfaatkannya sebagai penghasil listrik.
- Warga tersebut merakit turbin untuk PLTMH berdasarkan ilmu yang didapatnya selama berkuliah di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Modal perakitan turbin didapat dari hasil menjual satu ekor kerbau dan sepetak sawah, dibantu pembangunan sarana penunjangnya secara gotong-royong.
- Cara kerja PLTMH:
 - a) Air sungai ditampung dalam bendungan di dataran lebih tinggi.
 - b) Air dialirkan ke dataran lebih rendah melalui bangunan pengambil (intake) lalu ke saluran pembawa hingga ke bak penampungan.
 - c) Dari bak penampungan air dialirkan ke rumah pembangkit yang untuk menghasilkan listrik.
 - d) Listrik ditransmisikan melalui kabel ke rumah-rumah warga.

- Kriteria operasional PLTMH :
 - a) Bisa digerakkan dengan debit air hanya 20 liter/detik.
 - b) Tinggi jatuhnya (head) air antara 1 hingga 200 meter.
- Pada pengoperasian awal, turbin sempat mengalami kendala teknis namun permasalahan tersebut bisa diatasi secara bertahap.
- Beberapa warga juga sempat menolak adanya pembangunan jaringan listrik karena berpendapat bahwa listrik berbahaya dan listrik tidak boleh dibawa masuk ke desa karena bukan warisan nenek moyang.
- Pemerintah Desa melakukan sosialisasi bersama warga pembuat turbin PLTMH, Bpk. Linggi, untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat listrik.
- Pendekatan yang dilakukan secara personal dan kekeluargaan tersebut mendapat respon positif dari warga untuk mulai beroperasinya jaringan listrik.
- Pada tahun 1993 PLTMH mulai beroperasi dengan daya 3.000 watt dan bisa mengalirkan listrik ke 30 rumah warga. Biaya penggunaan listrik tersebut diberikan secara gratis kepada warga sebagai kontribusi Bpk. Linggi kepada desa.
- Pada tahun 2006, seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan turbin PLTMH, Bpk. Linggi membangun bengkel yang berfokus pada produksi dan perbaikan turbin dengan memberdayakan warga desa.
- Sampai dengan 2017, Desa Batanguru telah dikenal sebagai lokasi penyedia turbin dan menerima pesanan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur.

Pendanaan

- Swadaya

Pelaku

- Pemerintah desa
- Tokoh pembuat turbin
- Warga

Hasil

- Hingga 2017 kapasitas PLTMH di Desa Batanguru mencapai 50 ribu watt dan bisa mengaliri listrik untuk 276 kepala keluarga (1.172 jiwa).
- Aliran listrik juga menjangkau sekitar 200 kepala keluarga di wilayah lain, seperti Desa Banea dan Kelurahan Tabone.
- Terbukanya lapangan kerja dari adanya bengkel turbin.
- Dengan adanya listrik, muncul usaha rumahan seperti pertukangan, menjahit, fotokopi, bengkel motor, pengolahan kopi, pengolahan jagung, dan peternakan ayam.
- Di malam hari, anak-anak sekolah dapat belajar dan pelayanan kesehatan darurat dapat dilakukan karena adanya penerangan listrik.

Pembelajaran

- Potensi sumber daya alam yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan desa, dalam hal ini potensi aliran sungai untuk jaringan listrik desa.
- Dalam hal membangun fasilitas umum seperti PLTMH, diperlukan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.
- Perubahan besar di masyarakat, terutama bagi hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan turun temurun, memerlukan pendekatan personal dan kekeluargaan yang intens.
- Warga yang bersekolah ke jenjang perguruan tinggi bisa memanfaatkan ilmunya untuk membangun desa.

Rekomendasi

- Perlu sistem pengelolaan dan perawatan PLTMH yang bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa.
- Perlu dibuat sistem pelatihan agar melahirkan ahli-ahli turbin lainnya sebagai penerus Bpk. Linggi.
- Bengkel turbin Bpk. Linggi dapat dipromosikan sebagai Penyedia Jasa Layanan Teknis untuk memenuhi kebutuhan desa lain.

Kontak Informasi

Bpk. Linggi

HP : 085240711755

Email: linggi.btu@gmail.com

Kepala Desa Batanguru Zakaria

HP : 085340757484

PENGELOLAAN DALAM PENGGUNAAN

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) UNTUK KEBERLANJUTAN PASOKAN LISTRIK DESA

Desa Patamanyang, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, berhasil mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun pada tahun 2004 hingga kini. Selain Peraturan Desa yang memercayakan pengelolaan PLTMH kepada Unit Pengelola Turbin (UPT) dengan struktur pengurus yang jelas, juga dibuat peraturan penggunaan listrik, pengelolaan iuran listrik dan alokasi dana sosial bagi warga kurang mampu.

Latar Belakang

- Desa Patanyamang lokasinya sulit dijangkau karena berdada di daerah pegunungan dg akses jalan tanah berbatu berbelok belok dan naik turun, serta hanya dapat dilalui dengan kendaraan dobel gardan.
- Desa ini terdiri dari 3 dusun dengan 370 KK, atau 1.200 jiwa, yg belum memperoleh layanan listrik dari PLN.
- Penerangan malam menggunakan petromaks dan lampu minyak tanah sehingga kegiatan masyarakat di malam hari menjadi terbatas.
- Dengan memanfaatkan aliran sungai-sungai yang deras, dibangun PLTMH sebagai pemasok listrik, tapi muncul tantangan tentang pengelolaan dan keberlanjutan pengelolaannya.

Solusi

Sistem pengelolaan PLTMH untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat desa

Proses

- Kader lingkaran inti memanfaatkan kegiatan informal dan formal di dusun dan desa untuk mendorong isu kebutuhan masyarakat akan adanya pengelolaan PLTMH.
- Sosialisasi kebutuhan pengelolaan PLTMH awal ini meluas hingga ke perkumpulan dan pertemuan warga lainnya seperti pengajian, arisan, dan kegiatan masjid sehingga terbangun komunikasi 2 arah menuju kesepakatan.
- Desa menerbitkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Listrik Desa (turbin) PLTMH.
- Berdasarkan Peraturan Desa tersebut, dilakukan Musyawarah Desa untuk menyepakati pembentukan Unit Pengelola Turbin (UPT) untuk mengelola dan memelihara PLTMH.
- Disusun dan disepakati sebuah AD/ART yang mengatur biaya pemasangan, jumlah titik lampu dan petting untuk tiap pelanggan, besarnya iuran bulanan, pembatasan alat elektronik yang boleh digunakan, beban biaya alat elektronik, serta tanggal pembayaran iuran, antara lain:
 - » Listrik mulai dinyalakan pukul 17:00 sd 07:00
 - » Pada hari Minggu dan Jumat, turbin tetap dioperasikan 24 jam
 - » Setiap KK pemanfaat listrik dikenakan iuran antara Rp 18.000/bulan sd Rp 40.000/bulan, tergantung pemakaian
 - » Biaya tambahan dikenakan untuk peralatan elektronik tambahan seperti kulkas, televisi, kipas angin, dll.

- » Mengatur pemadaman secara bergilir di tiga jalur yang ada dan membangun bak penampung air untuk mengatasi keterbatasan daya yang terjadi saat musim kemarau karena debit air sungai berkurang.
- » Sanksi bagi pemanfaat yang melanggar peraturan dijalankan sesuai AD/ART secara konsisten.
- » Ada kesepakatan diantara pengurus, dalam menindak pelanggan yang melanggar sampai tahap pemutusan jaringan dilakukan oleh pengurus yang masih mempunyai hubungan famili dengan harapan menimbulkan rasa malu dan jera.
- » Sanksi pemutusan jaringan dikenakan bagi pemanfaat yang melakukan sambungan ke tetangga dan atau menaikkan daya tanpa ijin. Sambungan akan dilakukan kembali setelah 1 bulan dan dikenakan biaya sambungan baru.
- Peraturan Desa tentang UPT PLTMH ini juga memuat antara lain:
 - » Menghimpun dana sosial untuk membantu pemanfaat yang terkena musibah atau kematian sebesar Rp. 500/pemanfaat/bulan.
 - » Pengembangan modal UPT dengan cara meminjamkan kepada pemanfaat untuk kebutuhan permodalan, pendidikan, atau sakit.
 - » Melakukan “jemput bola” untuk penarikan iuran dengan pelayanan di masing-masing dusun, baik di rumah petugas maupun di masjid sesudah sholat Jum'at.
 - » Membuat kebijakan “sambungan dari tetangga terdekat” tanpa dibebani biaya sambungan dan iuran bulanan bagi warga kurang mampu.
- Menggulirkan dana iuran listrik untuk kegiatan simpan pinjam sehingga dana tersebut berputar dan UPT mendapatkan pemasukan tambahan dari selisih bunga yang bebaskan kepada si peminjam yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah desa

Pelaku

- Tokoh masyarakat / Kepala Desa
- Pelaku teknis

Hasil

- Warga desa terlayani listrik di malam hari, seperti kegiatan kemasyarakatan, usaha rumah tangga, belajar dan mengaji di masjid, penerangan rumah dan jalan, menonton televisi.
- Desa memiliki sistem pengelolaan yang dinaungi Peraturan Desa terhadap fasilitas umum, dalam hal ini PLTMH, melalui Unit Pengelola Turbin (UPT) yang mandiri dan berkelanjutan.
- Dana sosial lebih terjamin keberlanjutannya untuk kebutuhan warga, antara lain untuk kegiatan usaha, pendidikan, atau musibah, dengan jasa pengembalian yang rendah (15% per tahun).
- Desa memiliki tenaga terlatih untuk mengoperasikan, merawat, serta memperbaiki turbin dan jaringan.

Pembelajaran

- Transparansi dan proses partisipatif dalam pengelolaan fasilitas umum desa memberikan kepercayaan dan memotivasi komitmen masyarakat untuk menaatinya.
- Masyarakat menyadari pentingnya menjaga aset desa dengan membuat sistem pengelolaan agar terjaga keberlanjutannya.

Rekomendasi

- Sistem pengelolaan PLTMH perlu senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan teknisnya.
- Perlu peningkatan kapasitas, pembinaan, pengawasan terhadap operator teknis.
- Sarana PLTMH dapat dikembangkan menjadi area yang mempunyai nilai jual sehingga dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

Kontak Informasi

Faisal Hidayat, Kepala Desa Patanyamang
HP: 085242345691

MENGUBAH SAMPAH

MENJADI TABUNGAN PENDIDIKAN & KESEHATAN

Inovator

Imam Sibaweah, warga desa Saribaye

Lokasi

Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar,
Kabupaten Lombok Barat

Warga desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, berhasil mengubah sampah menjadi tabungan untuk pendidikan dan kesehatan bagi anak dan keluarga mereka melalui bank sampah yang dikelola oleh masyarakat.

Kini, warga desa memiliki tabungan tambahan dan kondisi lingkungan relative bersih dari sampah kemasan, plastik dan botol.

Latar Belakang

- 1) Kebiasaan masyarakat tidak memperhatikan tempat membuang sampah
- 2) Banyak sampah menumpuk di sembaran tempat, termasuk di pinggir jalan sehingga merusak pemandangan dan bisa mengganggu kesehatan
- 3) Terjadi tawuran antarkampung akibat sampah

Upaya

Mengelola sampah (daur ulang) sehingga menjadi tambahan nilai pendapatan masyarakat berupa rekening tabungan.

Manfaat

- Lingkungan menjadi lebih bersih dan terpelihara
- Warga memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai pendidikan anak dan kesehatan keluarga
- Masyarakat sadar akan potensi sampah daur ulang

Proses

- 1) Warga mengeluhkan kondisi lingkungan dan kesehatan akibat sampah
- 2) Warga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan cara pengelolaan sampah, termasuk pada akademisi
- 3) Warga mendapat pengarahan tentang potensi sampah yang dapat dikelola secara gotong-royong oleh warga
- 4) Warga menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan membentuk struktur organisasi dan kepengurusan pengelolaan sampah bernama Bank Sampah My Darling (BSMD)
- 5) Struktur kepengurusan BSMD terdiri atas: Direktur, Wakil Direktur, Bendahara, Teller, dan petugas lapangan

- 6) BSMD kemudian membuat model kerja: penerimaan sampah, penimbangan sampah, pengepakan sampah, penjualan sampah ke pengepul, sampai perhitungan jumlah aset yang dikelola, jual-beli sampah, serta pengelolaan tabungan dari jual-beli sampah
 - o Tabungan Reguler – dicairkan kapan saja saat kebutuhan mendesak setelah 3 bulan menjadi nasabah BSMD
 - o Tabungan Pendidikan – dicairkan saat akhir semester tahun pelajaran
 - o Tabungan Lebaran – dicairkan saat hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha
 - o Tabungan Sembako – dicairkan saat kebutuhan sembako atau kebutuhan pangan seperti raskin
- 7) Sosialisasi Kepengurusan BSMD kepada masyarakat
- 8) BSMD mencari lokasi kerja dan mulai bekerja

Pelaku

- Warga desa Saribaye
- Masyarakat

Hasil

- 1) Sampah dapat dikelola dengan baik
- 2) Lingkungan sehat dan terpelihara
- 3) Warga memiliki penghasilan tambahan berupa tabungan

Pembelajaran

- Perubahan perilaku akan sampah daur ulang berubah. Mulai dari anak-anak dan orangtua melakukan penampungan sampah di rumah masing-masing. Bahkan, saat warga menyabit rumput seorang anak mengikuti orangtuanya menyabit rumput sembari mencari sampah daur ulang.
- Dua minggu setelah bank sampah beroperasi, sampah kemasan minuman dan sampah plastik dan botol yang dulunya berserakan di jalan-jalan, kini sukar ditemukan di jalan-jalan karena dipungut dan ditabung di bank sampah.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Sulhayani

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Barat

Kontak : 0819184185542

KEBIJAKAN TERNAK KAMBING UNTUK PENDIDIKAN

Inovator

Pemerintah Desa Barabali

Lokasi

Desa Barebali, Batukliang Utara,
Lombok Tengah

Pemerintah Desa Barabali, Batukliang Utara, Lombok Tengah, mendorong warganya untuk beternak kambing. Alasannya, tingkat reproduktivitas yang tinggi memungkinkan warga untuk memperoleh pendapatan lebih sehingga bisa ditabung untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Hasilnya, kini desa Barabali memiliki sentra kambing yang terkenal dan angka anak putus sekolah pun berkurang signifikan.

Latar Belakang

- 1) Selain bercocok tanam, warga desa Barabali memiliki potensi beternak kambing
- 2) Beternak kambing jenis tertentu menjanjikan keuntungan besar, tingkat reproduktivitas tinggi, dapat berkembang biak tiga kali dalam dua tahun dengan peluang kembar dua atau tiga
- 3) Desa Barabali memiliki tanah tropis luas dan subur, yang cocok untuk mengembang-biakan ternak
- 4) Telah adanya pasar ternak tradisional
- 5) Tingkat drop-out anak sekolah, terutama di Dusun Pondok Pande cukup tinggi karena masalah biaya

Upaya

Kebijakan mendorong warga beternak kambing untuk mendukung biaya pendidikan anak

Manfaat

- a. Meningkatkan pendapatan keluarga
- b. Untuk cadangan biaya pendidikan anak sekolah
- c. Investasi lebih aman, mudah didapat, mudah dipelihara, mudah dijual dan lebih aman dibandingkan dengan ternak lainnya, karena tidak disukai pencuri
- d. Sumber gizi keluarga berupa daging dan susu perah
- e. Dapat digunakan sendiri bila ada hajatan atau keperluan lain
- f. Kotorannya menjadi pupuk kompos tanaman

Proses

- 1) Kades dan perangkat desa terus mensosialisasikan ternak Kambing. Slogan NTB adalah Ternak Sejuta Sapi, maka Desa Barabali memilih Slogan Ternak 1000 Kambing. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kesempatan pertemuan warga, termasuk resepsi pernikahan, zikran dan pertemuan warga lainnya.
- 2) Kades dan perangkat juga mendatangi dusun-dusun, hingga 23 dusun yang ada di Barabali mengikuti ajuran desa mengembangkan ternak Kambing. Diantara yang paling sukses dan berkelanjutan adalah dusun Pondok Pande, sehingga dusun ini dipilih sebagai dusun tematik Ternak Kambing.

- 3) Desa memberikan pelatihan dan penyuluhan, dan pada 2017 ini desa membangun kandang kolektif mengingat populasi kambing yang relatif bertambah daritahun ke tahun. Per akhir 2016, jumlah kambing sebanyak 321 ekor atau 4 – 6 ekor kambing per KK. Jumlah kambing per Maret 2017 sebanyak 370 ekor.
- 4) Desa juga mengalokasikan dana Rp 50 juta untuk mendukung bibit unggul melalui APBDes 2017 perubahan. Dana tersebut untuk pengadaan bibit Kambing jenis Batangan.

Kebijakan Desa

1. Pada 2015:
 - a. Desa melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kelompok ternak yang ada dimasing-masing dusun agar lembaganya dapat berkembang dan memberdayakan anggotanya.
 - b. Desa memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan administrasi kelompok ternak dimasing-masing dusun.
 - c. Desa melakukan penyuluhan kepada peternak tentang pentingnya kotoran untuk dapat dijadikan sebagai pupuk organik dan lain sebagainya.
- 2) Pada 2016:
 - a. Pemerintah Desa Barabali melakukan advokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH.
 - b. Menjadikan satu kelompok unggulan ternak kambing di dusun Pondok Pande.

Hasil

- a. Anak putus sekolah sudah nol, dan umumnya anak tamat SD melanjutkan ke SMP, serta anak yang tamat SMP melanjutkan ke SLTA, yang kuliah pun sudah banyak berkat Ternak Kambing ini
- b. Dusun Pondok Pande dikenal oleh desa-desa lain atau daerah lain yang ingin membeli kambing
- c. Dusun Pondok Pande menjadi lokasi study banding bagi dusun dan desa lain terkait dengan pengelolaan Ternak Kambing
- d. Peternak mampu melihat peluang sesuai potensi yang dimilikinya, akan mengembangkan peluang ternak kambing perahan, kambing bibit unggul Ottawa dan Batangan.

Pembelajaran

- a. Pemberian bantuan dan pengembangan produk di dusun dan desa harus disesuaikan dengan potensi dan apa yang dimintai oleh masyarakat.
- b. Sosialisasi sangat penting baik secara formal maupun informal di setiap pertemuan warga.
- c. Kesadaran dan motivasi harus ditumbuhkan pada warga, tanpa motivasi dan kesadaran yang tinggi, sebarangpun besar bantuan yang diberikan kepada warga tidak akan berkesinambungan
- d. Masyarakat perlu diberikan contoh dan praktek nyata untuk dapat memulai sebuah kegiatan besar, dalam hal ini kades dan perangkat desa siap menjadi pionir dan memberikan contoh beternak Kambing, hasilnya masyarakat mulai termotivasi dan mengikuti program tersebut
- e. Kegiatan pengembangan ekonomi produktif dituntut untuk inovatif dan keberhasilannya dapat membantu mengatasi permasalahan kebutuhan dasar termasuk masalah kesehatan dan pendidikan.
- f. Masyarakat peternak Kambing perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas, difasilitasi Jaringan pemasaran dan pengelolaan hasil ternak agar semakin berkembang.
- g. Dusun Pondok Pande menjadi lokasi study banding bagi dusun dan desa lain terkait dengan pengelolaan Ternak Kambing

PENGELOLAAN SARANA AIR BERSIH DESA

Inovator

PAMDES Desa Ganggalang

Lokasi

Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara

Warga desa Ganggalang, Gangga, Lombok Utara, menyempurnakan pengelolaan sarana air bersih yang telah dimilikinya melalui bantuan program PNPM Perdesaan, dengan membentuk sebuah Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDES). Alhasil, distribusi air lebih merata, konflik akibat air teratasi dan desa pun memiliki pemasukan.

Latar Belakang

1. Desa Ganggalang memiliki luas wilayah 2.971 Ha dengan 14 dusun yang semuanya telah menerima bantuan pembangunan perpipaan sarana air bersih, namun hanya sebagian warga di hulu saja yang dapat menikmatinya
2. Warga yang tinggal di hilir tidak menikmati sarana air tersebut karena pipanya kosong
3. Sering terjadi konflik antara masyarakat hulu dan hilir akibat perbedaan tersebut
4. Disepakati untuk dibangun sarana perpipaan guna mendekatkan kebutuhan air ke permukiman dengan membuat kran umum
5. Sistem pengelolaan air belum tertata, kepengurusan tidak berjalan baik, perhatian pemerintah kurang, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air tersebut juga rendah, dan tidak berjalannya aturan/awig-awig yang telah dibuat

Upaya

Dibentuk sebuah Pengelolaan Air Minum tingkat desa (PAMDES).

Manfaat

- Mendistribusikan air bersih kepada masyarakat secara adil dan merata
- Meredam konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan pasokan air
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya usaha ekonomi desa
- Mengelola air bersih secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung-jawabkan dan setara

Proses

1. Dilakukan musyawarah desa untuk membahas ide pendistribusian sumber air bersih desa
2. Disepakati bahwa sistem pengelolaan air minum desa tersebut bersifat sosial ekonomi, tidak mencari keuntungan, dan bersifat sosial kemasyarakatan
3. Pendirian PAMDES dengan nama PAMDES Lestari
4. Dibentuk struktur kepengurusan PAMDES yang berisi pengurus, badan pengawas, dan pelindung penasehat. Dicatat pula aset-aset PAMDES yang dimiliki untuk mendukung kegiatannya

5. Tata kelola PAMDES diatur dalam Peraturan Desa dan AD/RT PAMDES Lestari, antara lain harga pemakaian per bulan dan biaya penyambungan yang terjangkau oleh masyarakat miskin, serta hak/kewajiban pelanggan
6. PAMDES menambah jaringan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terjangkau jalur distribusi air dengan menggunakan pipa PVC 2" dan 1.5"
7. PAMDES menerapkan pemakaian atau pemasangan meteran air dengan cara berkelompok per dusun untuk sejumlah 710 pelanggan lalu dibuat peraturan hak dan kewajiban pelanggan, serta sanksi bila terlambat membayar, merusak, merubah posisi meteran, dan bila menyadap air secara ilegal
8. Dari hasil pembayaran rekening bulanan, dialokasikan 20% untuk APBDes, dan 80% untuk honor dan insentif pengurus serta dana sosial. Diatur juga beban pemeliharaan yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan, operasional, dan rehabilitasi sumber mata air.

Pelaku

Pemerintah dan warga Desa Ganggalang

Pendanaan

- Perpipaan: bantuan program PNPM Mandiri Perdesaan dan tambahan modal dari keuntungan pengelolaan/retribusi air yang dilakukan sebelumnya
- Operasional dan pemeliharaan: PAMDES

Hasil

- 1) Distribusi air tersalurkan dari hulu hingga hilir ke seluruh dusun di Desa Ganggalang
- 2) Desa Ganggalang memiliki usaha milik desa yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat
- 3) Konflik masyarakat akibat air teratasi

Rekomendasi

Dalam pembangunan perpipaan hendaknya dikaji pendistribusian dan rencana pemeliharaannya agar dapat mencapai seluruh warga yang berhak dan dapat melayani masyarakat secara berkesinambungan.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Satriawan

Jabatan : Tim Inovasi Kabupaten Lombok Utara

Kontak : 081997836114